



# Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 33 TAHUN IX/JUNI 2020



**55**  
**TAHUN**

## LAPORAN UTAMA

**SUMBANGSIH LEMHANNAS RI  
MEMBANGUN SDM UNGGUL  
di TENGAH PANDEMI COVID-19**

## PROFIL

**Reni Mayerni,**  
Jalani Karir dengan Sepenuh Hati

## SEPUTAR KITA

**Lemhannas RI Peringati HUT Ke-55 dan Hari Kebangkitan Nasional**

## HOT NEWS

**Lanjutan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Negara Sanggup  
Penuhi Tambahan Anggaran?**



# Hari Kartini

21 April

Kau bisa penjarakan dia  
Tapi tidak dengan suara dan  
pemikirannya ...





**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO

**PEMBINA** WIEKO SYOFYAN

**PENGARAH** DIDID WIDJANARDI

**PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI**

SUGENG SANTOSO

**REDAKTUR** ADRI KOESDYANTO

**PENYUNTING/EDITOR** BAMBANG IMAN ARYANTO

**DESAIN GRAFIS** ARINI MAULIDIA

**FOTOGRAFER** SUYONO

**SEKRETARIAT** ENDAH HELIANA, GATOT, MAULIDA

ARBANINGSIH, YUSNADI, AIDHA SAHLA ADIWIJAYA

**PENULIS ARTIKEL** MAGISTA DIAN FITRILIA, WIA YUNIA

PUTRI, NAOMI AUGUSTINA

**ALAMAT REDAKSI** BIRO HUMAS LEMHANNAS RI

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

**TELP.** (021) 3832108, 3832109

**FAX.** (021) 3451926

**EMAIL :** [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id)

**WEBSITE :** [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id)

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR

LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA

SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

## Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-33, Juni 2020, telah hadir di tengah-tengah kita. Pada edisi kali ini, Majalah Swantara menghadirkan beberapa rubrik yang menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca.

Dalam edisi kali ini redaksi mengangkat bagaimana peran Lemhannas RI di tengah pandemi Covid-19 dalam rubrik Laporan Utama yang dapat dijadikan referensi para pembaca. Selain itu, esai terbaik juga dapat menjadi pilihan sebagai referensi yang menarik.

Tak lupa, redaksi juga mengangkat pemberitaan seputar kegiatan Lemhannas RI diantaranya program pendidikan reguler angkatan (PPRA) 60 dan 61. Selain itu, juga ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan kelembagaan di Lemhannas RI.

Tak hanya itu, Majalah Swantara juga menghadirkan rubrik Profil Pejabat dan Pegawai, Suara Peserta, Hot News dan Ragam yang dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tak ada gading yang tak retak, redaksi menyadari Majalah Swantara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi berikutnya.

Tak lupa redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 33 kali ini. Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

# Daftar Isi



- 11 Bambang Brodjonegoro: Pentingnya Kemitraan *Triple Helix*
- 14 Agus Widjojo: Revolusi Mental Kepemimpinan Adalah Fokus Ego Menjadl Fokus Eko
- 16 Potensi Laut Indonesia Dalam Revolusi Industri 4.0
- 18 Gubernur Lemhannas Ri: Proses Menjadi Pimpinan Adalah Proses Sepanjang Hayat
- 20 Retno Marsudi Berikan Pembekalan Pada Peserta PPRA 60

- 28 Kepala BIG: Data Sudah Menjadi Senjata Baru
- 30 Keluarga Sebagai Kekuatan Sosial Dalam Mendukung Ketahanan Nasional
- 31 Lemhannas RI Peringati HUT Ke-55 dan Hari Kebangkitan Nasional
- 33 Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengatasi COVID-19
- 34 Agus Widjojo: Mengukur Nilai-Nilai Pancasila Harus Dari Wujud Konkret

- 44 RAGAM Ilmuwan Inggris Kembangkan Inhaler Untuk Cegah Gejala Corona
- 45 Kenapa Banyak Virus Berasal Dari Kelelawar Bisa Mematikan?
- SUARA PESERTA
- 46 Bersyukur Menjadi Peserta Pendidikan Lemhannas RI
- 47 Berdamai Menjalani Pendidikan di Kala Pandemi
- 48 ESAI TERBAIK Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa

- 52 GALLERY

*Untuk semua buruh  
yang telah berjuang  
di kala pandemi*

**Selamat Hari Buruh**





# Sumbangsih Lemhannas RI Membangun SDM Unggul di Tengah Pandemi Covid-19

Lemhannas RI merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tiga tugas dalam membantu presiden, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematangan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; Kedua, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan ketiga, menyelenggarakan pematangan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

## RPJMN IV 2020-2024

Salah satu tugas yang diemban Lemhannas RI adalah penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV 2020 – 2024. Salah satu agenda pembangunan yang selaras dengan fungsi tersebut adalah membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui, 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; 2) Memajukan kebudayaan; 3) Meningkatkan pemahaman pengamalan, dan penghayatan nilai agama; 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; 5) Meningkatkan budaya literasi.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara bangsa majemuk (agama, etnis, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, keyakinan lokal), yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Maka, setiap komponen bangsa yang berbeda harus senantiasa menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, dan membangun harmoni dalam perbedaan dan keragaman, yang dilandasi oleh semangat dan jiwa gotong royong sebagai jati diri bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada keragaman dan perbedaan, bukan pada persamaan

dan keseragaman. Karena itu, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem persekolahan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosialkemasyarakatan.

Sementara arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN IV 2020 – 2024 yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Lemhannas RI diantaranya adalah penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi, penguatan ketahanan dan kualitas keluarga, pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, peningkatan budaya literasi, dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

## Pendidikan Lemhannas RI di Pandemi Tengah Covid-19

Lemhannas RI pada tahun 2020 melaksanakan dua Program

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61. PPRA 60 dibuka pada tanggal 21 Januari 2020 yang diikuti 100 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 14 orang, Partai Politik sebanyak 1 orang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebanyak 2 orang, Organisasi Masyarakat sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 40 orang, Polri sebanyak 20 orang, dan peserta berasal dari negara sahabat yakni Australia, Bangladesh, India, Fiji, Kamboja, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka sebanyak 9 orang.

Sedangkan PPRA 61 yang dibuka pada 2 April 2020, diikuti 100 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 15 orang, Lembaga Non Struktural sebanyak 2 orang, BUMN sebanyak 2 orang, Pemerintah Provinsi sebanyak 2 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Partai Politik sebanyak 1 orang, Kopertis sebanyak 1 orang, Organisasi Masyarakat sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 40 orang, Polri sebanyak 18 orang, dan peserta berasal dari negara sahabat yakni Singapura, Myanmar, Laos, Malaysia, Sri Lanka, Arab Saudi, Kamboja, Nigeria, dan Pakistan sebanyak 10 orang.

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), secara resmi ditetapkan oleh World Health



Foto. humas-ihh

Organization (WHO) pada Rabu 11 Maret 2020. Saat itu, Indonesia sendiri sudah mengidentifikasi pasien positif Covid-19 sejumlah 27 orang dengan 2 pasien sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Berselang empat hari, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.

Menyikapi kondisi tersebut, Lemhannas RI tidak serta merta untuk meniadakan dua program pendidikan tersebut. Namun, Lemhannas RI menyasatinya dengan menerapkan metode off campus, tanpa mengurangi kualitas pengajaran dan pendidikan. Lemhannas RI memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan sistem e-Learning sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar walaupun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Pelaksanaan e-Learning dilakukan dengan metode video conference sehingga pemberi materi dapat memberikan materi melalui audio dan visual secara langsung pada peserta.

Saat itu, PPRA 60 tengah menempuh kegiatan on campus usai menjalani kegiatan off campus selama satu bulan, namun pada tanggal 23 Maret 2020, peserta PPRA 60 kembali menjalani kegiatan off campus. Sementara PPRA 61 yang di buka pada tanggal 2 April 2020, secara otomatis menerapkan metode off campus, termasuk ketika pembukaan PPRA 61 yang dilakukan secara video conference call. Secara umum pelaksanaan kedua PPRA tersebut, tidak melaksanakan kegiatan pelaksanaan on-campus, kegiatan Outbound, Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN), serta Olah Sismennas hingga masa darurat pandemi Covid-19 berakhir.

Langkah ini, diambil Lemhannas RI dalam menjaga physical distancing

sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan sekaligus sebagai wujud komitmen Lemhannas RI untuk mendukung langkah pemerintah serta mengutamakan keselamatan bersama. Namun demikian, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkapkan bahwa cara ini baru kita laksanakan pertama kali, sehingga banyak hal yang akan baru dipelajari dalam bekerja. Oleh karena itu, Agus mengimbau peserta untuk jangan ragu-ragu dalam menyampaikan tentang hal-hal yang mengganggu proses belajar-mengajar sebagai masukan agar lembaga dapat segera mengatasinya. “Kita semua berharap bahwa keadaan ini bisa diatasi, dan kita dapat kembali ke bentuk proses belajar-mengajar secara tatap muka seperti biasanya,” ujar Agus.

Sebagai kader pemimpin tingkat nasional, kemampuan akademis dan kewenangan dalam jabatan tentunya tak cukup untuk menjadi seorang pemimpin tingkat nasional. Etika, moral dan kejujuran, juga dituntut dari pemimpin tingkat nasional. Selain itu, prasyarat lain yang juga harus dimiliki adalah pola pikir, pola sikap dan pola tindak berdasarkan pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang holistik, integral dan komprehensif.

Keberadaan para peserta PPRA

61 dalam hubungan organisasi senat peserta juga akan menjadi proses belajar dan laboratorium bagi pembentukan watak kepemimpinan para peserta. Dalam proses PPRA 61, para peserta bukan hanya akan mengalami eksperimen sebagai pemimpin tetapi juga sebagai pengikut dalam hubungan organisasi. “Secara singkat dapat dikatakan bahwa revolusi mental kepemimpinan adalah mengubah sikap dari sikap tertutup menjadi terbuka, dan dari fokus ego menjadi fokus eko atau lingkungan sekitar,” ungkap Agus.

Pendidikan di Lemhannas RI, pada dasarnya tidak membuat persaingan diantara peserta. Namun, setiap peserta diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri dan membuktikan bahwa ketika selesai mengikuti proses belajar-mengajar, para peserta telah menjadi individu yang berbeda dengan pengetahuan, keterampilan analisis serta dalam wawasan kebangsaan yang lebih berkualitas dari sebelumnya.

## HUT Lemhannas RI, Membangun SDM Unggul

Pada tahun 2020 ini, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI pada tanggal 20 Mei merayakan ulang tahunnya ke 55. Tema hari ulang tahun kali ini, mengangkat tema “Dengan Semangat Kebangkitan



Foto: humas-lhn



Nasional, Kita Bangun SDM Unggul Indonesia Maju". Selain bertepatan dengan bulan suci Ramadhan tahun 1441 Hijriah, perayaan ulang tahun Lemhannas RI juga dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, perayaan hari ulang tahun Lemhannas RI dilakukan secara sederhana, bahkan Lemhannas RI juga turut memberikan bantuan sejumlah 15.500 alat kesehatan yang terdiri dari 500 Alat Pelindung Diri (APD), 10.000 Sarung Tangan Medis, dan 5.000 Masker kepada beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas.

Lemhannas RI juga memanfaatkan momentum ini untuk melakukan berintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan amanah pendiri bangsa dalam memelihara semangat kebangkitan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

Sementara kelahiran Lemhannas RI yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, lebih diidentikkan dengan fungsi Lemhannas RI untuk membekali para pemimpin tingkat nasional dengan pengetahuan guna meningkatkan pengabdian ketika lulus dari pendidikan. Ini mengingatkan bahwa peradaban manusia dibangun atas pondasi pengetahuan, bukannya kekuasaan dan bukan melalui kekerasan.

Lemhannas RI yang didirikan

pada 55 tahun silam, dilatarbelakangi oleh situasi Indonesia saat itu sebagai negara yang baru 20 tahun merdeka, dihadapkan pada pertarungan politik dan kepentingan di dalam negeri yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, di lingkup global juga terjadi pertarungan pengaruh blok barat (Amerikat Serikat) dan blok timur (Uni Soviet) yang semakin meruncing sehingga mempengaruhi situasi nasional saat itu.

Dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran strategis untuk menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI, maka Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memandang perlu adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai kawah candradimuka pembentukan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang berasal dari berbagai komponen bangsa untuk ditempa menjadi calon pemimpin nasional yang memahami kebangsaan Indonesia dan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Oleh karena itulah, keberadaan Lemhannas RI tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik dan kehidupan berkebangsaan Indonesia.

Inilah yang menjadi alasan mengapa Lemhannas RI diresmikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang secara tersirat jiwa

dan semangat perjuangan Lemhannas RI merupakan semangat kebangkitan nasional yang mampu mendorong bangkitnya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam kebhinnekaan

dan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Jiwa dan semangat tersebutlah yang menjadi ruh Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

Dengan semangat kebangkitan nasional pulalah, Lemhannas RI, di tengah pandemi Covid-19 ini tetap memberikan yang terbaik dalam membentuk kader-kader pimpinan nasional melalui PPRA 60 dan 61. Lemhannas RI menjamin mutu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak dibawah mutu pelaksanaan PPRA dan atau PPSA sebelumnya. Mutu proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh tenaga pengajar tetapi juga oleh peserta didik yang harus bersungguh-sungguh untuk menempuh pendidikan.

Inilah komitmen Lemhannas RI sebagai wujud eksistensinya yang memiliki visi menjadi pusat layanan unggulan (*center of excellence*) yang berkualitas dan kredibel dalam bidang ketahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Dirgahayu Lemhannas RI. Tanhanna Dharmma Mangrva.





## Cegah Penyebarluasan COVID-19, PPRA 60 Kembali *e-Learning*

Pengambilan langkah pembelajaran jarak jauh merupakan sikap Lemhannas RI dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan sebagai wujud komitmen Lemhannas RI untuk mendukung langkah pemerintah serta mengutamakan keselamatan bersama.

Foto:  
humas-lhn

Peserta PPRA 60 kembali menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh (*e-Learning*) mulai Senin (23/3) sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Hal tersebut dilaksanakan terkait dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia. Pengambilan langkah pembelajaran jarak jauh merupakan sikap Lemhannas RI dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan sebagai wujud komitmen Lemhannas RI untuk mendukung langkah pemerintah serta mengutamakan keselamatan bersama.

Lemhannas RI memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan sistem *e-Learning* sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar walaupun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Pelaksanaan *e-Learning* dilakukan dengan metode

*video conference*. Dalam *video conference*, pemberi materi dapat memberikan materi melalui audio dan visual secara langsung pada peserta PPRA 60.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI bertujuan menyiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang mampu berpikir secara komprehensif, integral, profesional, berkarakter, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.

Oleh karena itu semua komponen dalam pelaksanaan pendidikan Lemhannas RI selalu diarahkan untuk menuju tercapainya maksud dan tujuan serta sasaran pendidikan yang telah ditetapkan, serta dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif, komparatif, kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri serta ancaman regional maupun internasional.



## Bambang Brodjonegoro: Pentingnya Kemitraan *Triple Helix*

Namun diharapkan nantinya transformasi ekonomi tidak saja memberikan daya saing bagi bangsa dan negara, tetapi yang terpenting adalah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,

**Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D.**  
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

**Foto.**  
humas-1hn

**E**kosistem yang lengkap bisa terbentuk kalau sudah ada kemitraan 3 pihak yang kuat, *triple helix*,” kata Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D saat memberikan materi melalui *video conference* kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada Selasa (31/3).

Bambang memberikan penjelasan mengenai 5 arahan presiden yang terkait dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan riset dan inovasi. Tentunya riset dan inovasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan menjadi topik utama kabinet Indonesia Maju. Inovasi yang dituju bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi inovasi yang langsung berdampak terhadap daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu inovasi juga tidak hanya demi pertumbuhan, namun juga untuk memecahkan isu pemerataan. Isu pemerataan tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga turut

serta menjaga lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan juga untuk mendorong transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi yang dimaksud tidak hanya ditunjukkan dan disimbolkan dengan perubahan dari sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi sektor ekonomi yang lebih berbasis pada pengolahan atau nilai tambah, tetapi bagaimana menjadikan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi yang berbasis inovasi. Ekonomi berbasis inovasi akan menciptakan daya saing yang lebih kuat dan keunggulan secara relatif di berbagai belahan dunia.

“Namun diharapkan nantinya transformasi ekonomi tidak saja memberikan daya saing bagi bangsa dan negara, tetapi yang terpenting adalah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Untuk menunjang tujuan tersebut, salah satu hal yang akan dilakukan adalah melakukan integrasi dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Bambang sebaiknya kegiatan



penelitian dan pengembangan yang terpisah tersebut bisa diintegrasikan semuanya ke dalam Kemenristek/BRIN.

“Namun, kita belum memiliki ekosistem yang lengkap akan inovasi itu sendiri dimana ekosistem yang lengkap bisa terbentuk kalau sudah ada kemitraan 3 pihak yang kuat, *triple helix*,” kata Bambang. *Triple helix* adalah gambaran kemitraan antara dunia penelitian (akademisi), dunia swasta (usaha) sebagai pihak yang memanfaatkan hasil penelitian, dan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya inovasi.

Saat ini ekosistem belum berjalan baik karena masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri dan pemerintah belum terlalu intens untuk memfasilitasi adanya saling pengertian antara sisi dunia usaha dengan dunia penelitian. “*Triple helix* akan terus menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem inovasi,” ujar Bambang.

Negara-negara yang berhasil maju dengan basis inovasi tidak akan bisa melakukan inovasi secara optimal



**Triple helix adalah gambaran kemitraan antara dunia penelitian (akademisi), dunia swasta (usaha) sebagai pihak yang memanfaatkan hasil penelitian, dan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya inovasi.**

kalau tidak didukung dengan birokrat yang reformis. Artinya birokratnya harus bisa dalam posisi mendukung atau memfasilitasi terjadinya inovasi tersebut. Apabila birokratnya menyatakan punya tata kelola yang baik tapi hasilnya adalah sesuatu yang menghambat terjadinya inovasi atau tidak mendorong lahirnya inovasi di kalangan masyarakat, maka tentunya arah dari reformasi birokrasi tersebut perlu diperbaiki. “Tentunya sasarannya kita ingin tata kelola berujung pada reformasi birokrasi,” tutur Bambang.

Kemenristek/BRIN juga ingin memberikan sumbangsih lebih besar lagi kepada proses birokrasi di Indonesia supaya birokrasi tidak terlalu berorientasi pada pembuatan aturan, tetapi berbicara mengenai pentingnya reformasi birokrasi. “Bagaimana menciptakan birokrasi yang bisa mendukung kegiatan inovasi karena hanya negara yang inovatif yang bisa memenangkan persaingan dan bisa menjadi negara maju,” pungkas Bambang.

MEMPERINGATI

# HARI PENDIDIKAN NASIONAL

2 MEI 2020

“Belajar dari Covid-19”





## Agus Widjojo: Revolusi Mental Kepemimpinan adalah Fokus Ego menjadi Fokus Eko

Kita semua berharap bahwa keadaan ini bisa diatasi, dan kita dapat kembali ke bentuk proses belajar-mengajar secara tatap muka seperti biasanya.

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

**Foto.**  
humas-lhn

Lemhannas RI membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada Kamis (2/4) dengan menggunakan *video conference* yang tidak memerlukan kehadiran langsung oleh peserta PPRA 61. Hal tersebut dilakukan demi menjaga *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa PPRA 61 yang direncanakan berlangsung selama tujuh bulan, diikuti sebanyak 100 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 15 orang, Lembaga Non Struktural sebanyak 2 orang, BUMN sebanyak 2 orang, Pemerintah Provinsi sebanyak 2 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Partai Politik sebanyak 1 orang, Kopertis sebanyak 1 orang, Organisasi Masyarakat sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 40 orang, Polri sebanyak 18

orang, dan peserta berasal dari negara sahabat yakni Singapura, Myanmar, Laos, Malaysia, Sri Lanka, Arab Saudi, Kamboja, Nigeria, dan Pakistan sebanyak 10 orang.

Dalam laporan tersebut Karsiyanto juga menegaskan bahwa pelaksanaan *On-campus*, kegiatan *Outbound*, Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN), serta Olah Sismennas ditiadakan apabila kondisi darurat COVID-19 masih diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Upacara pembukaan pada hari ini dilaksanakan secara *online* dengan setiap peserta upacara berada di tempat masing-masing. Cara ini merupakan bentuk yang paling efektif mengimplementasikan prinsip pencegahan penularan yaitu “kerja dari rumah” dan *social* atau *physical distancing*,” kata Gubernur Lemhannas RI LetjenTNI (Purn) Agus Widjojo.

Agus juga menyampaikan bahwa cara ini baru kita laksanakan pertama kali, sehingga banyak hal yang akan baru dipelajari dalam bekerja. Oleh karena hal tersebut, Agus mengimbau peserta untuk jangan ragu-ragu dalam menyampaikan tentang hal-hal yang



mengganggu proses belajar-mengajar sebagai masukan agar lembaga dapat segera mengatasinya. “Kita semua berharap bahwa keadaan ini bisa diatasi, dan kita dapat kembali ke bentuk proses belajar-mengajar secara tatap muka seperti biasanya,” ujar Agus.

Selanjutnya Agus mengatakan bahwa sebagai kader pemimpin tingkat nasional, kemampuan akademis dan kewenangan dalam jabatan saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin tingkat nasional. Seorang pemimpin tingkat nasional harus memiliki etika, moral dan kejujuran, yang menjadi prasyarat lainnya yang harus dimiliki untuk membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak berdasarkan pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang holistik, integral dan komprehensif.

Keberadaan para peserta PPRA 61 dalam hubungan organisasi senat peserta juga akan menjadi proses

belajar dan laboratorium bagi pembentukan watak kepemimpinan para peserta. Dalam proses PPRA 61, para peserta bukan hanya akan mengalami eksperimen sebagai pemimpin tetapi juga sebagai pengikut dalam hubungan organisasi. “Secara singkat dapat dikatakan bahwa revolusi mental kepemimpinan adalah mengubah sikap dari sikap tertutup menjadi terbuka, dan dari fokus ego menjadi fokus eko atau lingkungan sekitar,” tutur Agus.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa hasil yang seyogyanya dicapai dari mengikuti pendidikan ini adalah bahwa para peserta harus menjadi lebih lengkap memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat analisis dan keputusan pada tingkat strategis sebagai seorang pemimpin. Artinya adalah para peserta harus bisa memberi nilai tambah bagi diri sendiri pada saat selesai mengikuti pendidikan, dibanding dengan ketika para peserta belum mengikuti

pendidikan seperti pada hari ini.

Proses belajar-mengajar di Lemhannas RI bukan untuk membuat persaingan antara sesama peserta. Namun, setiap individu peserta diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri dan membuktikan bahwa ketika selesai mengikuti proses belajar-mengajar para peserta telah menjadi individu yang berbeda dengan pengetahuan, keterampilan analisis serta dalam wawasan kebangsaan yang lebih berkualitas dari masa sebelumnya. “Lemhannas RI tidak mengajarkan lomba kepandaian antar peserta,” ujar Agus.

Menekankan mengenai revolusi mental dalam sambutannya, Agus juga menegaskan bahwa etika, moral dan kejujuran harus menjadi pijakan utama para peserta dalam berinteraksi diantara sesama peserta maupun interaksi dengan para tenaga pengajar. “Revolusi mental dimulai dari diri sendiri” pungkasnya.



# Potensi Laut Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun strategi dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Strategi tersebut adalah dengan memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan pengoptimalan dan penguatan budidaya perikanan.

**Edhy Prabowo**  
Menteri Kelautan dan Perikanan RI

**Foto.**  
humas-lhn

**M**enteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 mengangkat topik “Mengolah Potensi Kelautan Menjadi Produk-Produk Unggulan Nasional dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0” pada Rabu, (8/4).

Dalam diskusi panel tersebut Edhy melihat posisi Indonesia yang begitu strategis telah menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Edhy kemudian menjelaskan bahwa total potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mencapai US\$ 1.338 miliar/tahun setara dengan 5 kali lipat APBN 2019.

“Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membangun strategi dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Strategi tersebut adalah dengan memperbaiki komunikasi

dengan nelayan dan pengoptimalan dan penguatan budidaya perikanan,” terang Edhy.

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, KKP RI melakukan berbagai terobosan. Beberapa diantara terobosan tersebut ialah melakukan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap 1 jam secara daring dan pembuatan Aplikasi Kegiatan Usaha Bisnis Akuakultur (AKUBISA). Selanjutnya adalah menciptakan aplikasi berbasis android yakni Sistem Informasi Laut Nusantara dan Sistem Informasi Nelayan Pintar.

Kemudian memanfaatkan Stasiun Bumi Bali Radar Satelit (BARATA) untuk memantau aktivitas *illegal fishing*, pendugaan stok ikan, pemantauan terumbu karang, pemantauan mangrove dan *Integrated Coastal Zone Management*, pemantauan budidaya rumput laut, pemantauan budidaya udang serta pemantauan tumpahan minyak di laut. KKP juga menyelenggarakan DIGIFISH yakni acara pada bidang inovasi digital kelautan dan perikanan untuk mempertemukan para pelaku inovasi dengan pelaku industri perikanan dan investor agar menjalin sinergitas.





Foto. shiftindonesia.com

Selain itu, narasumber lain dalam diskusi panel adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Abdul Rochim, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI Teguh Setyabudi. Dalam kesempatannya, Abdul Rochim menjelaskan arah kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas usaha melalui investasi dan akses pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran inovatif oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu usaha pengolahan ikan skala mikro kecil, menengah, dan besar.

Diharapkan beberapa kebijakan tersebut akan menghasilkan peningkatan investasi dan pembiayaan, meningkatnya volume produk olahan, meningkatnya angka konsumsi ikan, meningkatnya ekspor hasil perikanan, meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pengolahan, dan meningkatnya indeks kinerja logistik.

“Implementasi Industri 4.0 pada Industri pengolahan perikanan antara lain pada bagian *supply chain* bahan baku dan proses produksi,” ujar Abdul. *Supply chain* bahan baku diharapkan akan meningkatkan kualitas dan konsistensi bahan baku, efisiensi rantai suplai, dan menurunkan tingkat penyusutan. Sedangkan pada proses produksi diharapkan peningkatan mutu dan rendemen, kecepatan pengambilan keputusan dan efisiensi energi.

Sementara, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Revolusi Industri 4.0 menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa tuntutan tersebut adalah pelayanan serba cepat, biaya pelayanan murah dan efisien, transparansi informasi publik, serta aksesibilitas, akurat, mudah, dan tepat. Selanjutnya Teguh menyampaikan bahwa dalam mewujudkan hal tersebut kolaborasi 4 pelaku pembangunan sangatlah penting.

Empat pelaku yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat dengan

kebijakan serta APBN dan potensi lainnya, Pemerintah Daerah dengan otonomi, OPD, APBD dan potensi lainnya, Pihak Swasta dengan segala potensi yang dimiliki, serta Akademisi dengan segala potensinya. “Membangun harus dengan sinergi dan konektivitas, serta harus fokus pada program dan memiliki skala prioritas,” ujar Teguh.

Menurut Teguh yang harus dilakukan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi, menggunakan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan potensi kelautan menjadi produk unggulan nasional, melakukan inovasi dan kolaborasi dengan sektor lain, menyiapkan SDM yang melek teknologi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan tetap mendasarkan diri pada azas kekeluargaan dan gotong royong, serta pembuatan *grand design* dan *road map* yang jelas mengenai pengelolaan kalautan menjadi produk-produk unggulan nasional dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.



## Gubernur Lemhannas RI: Proses Menjadi Pimpinan adalah Proses Sepanjang Hayat

### Pengetahuan dan kompetensi harus didasarkan kepada konsensus dasar bangsa.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo  
Gubernur Lemhannas RI

Foto:  
humas-lhn

**P**eserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 Lemhannas RI mendapatkan pembekalan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, pada Kamis (9/4), melalui *video conference call* untuk menerapkan *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Dalam pembekalan tersebut Agus menyampaikan harapannya agar kebijakan pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi kualitas PPRA 61, karena kualitas pendidikan akan diukur dari bagaimana peserta dapat memanfaatkan keberadaan di Lemhannas RI untuk memberikan nilai

tambah pada diri masing-masing.

“Oleh karena itu, peran aktif peserta sangat diharapkan. Jangan peserta hanya diam menerima, tetapi justru harus ada peran aktif dari peserta yang akan menentukan kualitas lulusan nantinya pada diri masing-masing,” kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus menjelaskan latar belakang pendirian Lemhannas RI yang awalnya merupakan Lembaga Pertahanan Nasional. Kemudian Agus juga menjelaskan *core* Lemhannas RI dalam menjalankan peran dan fungsinya yaitu empat Konsensus Dasar Bangsa yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Paradigma Nasional yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional.

“Proses menjadi pimpinan adalah proses sepanjang hayat,” tutur Agus. Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa Lemhannas RI sebenarnya merupakan sentuhan akhir bagi pimpinan tingkat nasional yang sebelumnya sudah melampaui pendidikan dasar, sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu, dan hanya memerlukan persamaan paradigma cara berpikir dalam menangani masalah-masalah kebangsaan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kemampuan untuk menjabarkan warisan konsep-konsep, gagasan-gagasan, dan pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh para pendahulu. Terlebih, perjuangan di masa lampau adalah merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang berbeda dengan keadaan masa kini. Maka perlu dicari bentuk implementasi warisan tersebut untuk Negara Indonesia yang kini modern dan demokratis.

Menurut Agus, seorang pimpinan yang dibekali secara konstitusional untuk merumuskan kebijakan publik, harus memiliki pengetahuan untuk mengisi kebijakan dan memiliki kompetensi bagaimana merumuskan kebijakan. Akan menjadi suatu kekurangan jika seorang pejabat publik hanya mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan tanpa dibekali pengetahuan dan kompetensi merumuskan kebijakan. “Pengetahuan dan kompetensi harus didasarkan kepada konsensus dasar bangsa. Maka konsensus dasar bangsa harus disekrup mati,” ujar Agus.

Pembekalan tersebut tidak hanya diikuti oleh Peserta PPRA 61, namun juga diikuti oleh sejumlah tenaga pengajar, tenaga pengkaji, tenaga profesional dan pejabat struktural Lemhannas RI.



**BANGKIT**  
*dalam Optimisme*  
**NORMAL BARU**

# Bangkit

Dalam Optimisme  
Normal Baru

20 Mei 2020

Hari Kebangkitan  
Nasional





## Retno Marsudi Berikan Pembekalan Pada Peserta PPRA 60

Bahkan, ada negara-negara yang mulai cenderung tidak peduli dengan negara lain dan hanya melindungi negaranya sendiri dengan melarang warga negara yang sedang berada di luar negeri untuk kembali ke negara asal.

---

**Retno Marsudi**

Menteri Luar Negeri RI

---

**Foto.**

humas-lhn

---

**M**enteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memberikan pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Senin (20/4), secara *video conference call* dengan mengangkat topik Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Tata Kelola Global.

Retno menjelaskan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Laporan Situasi World Health Organization (WHO) Nomor 90 menunjukkan bahwa sudah terdapat 212 negara dan teritori yang terdampak *Cornavirus Disease* (COVID-19). Kemudian Retno menegaskan bahwa COVID-19 tidak mengenal batas negara dan tidak mengenal kemajuan atau kekayaan negara. Bahkan COVID-19 mengakibatkan keterbatasan sumber daya dalam mengatasi emergensi tersebut karena terjadi dalam waktu yang bersamaan. “Hampir semua negara tidak dapat menahan laju penyebaran virus ini,” ujar Retno.

Dalam konteks percobaan obat-obatan yang dapat meredakan penderita COVID-19, WHO sedang meluncurkan *WHO Solidarity Trial* yakni percobaan penggunaan sejumlah obat-obatan untuk pasien yang kemudian dilihat mana yang memberikan hasil terbaik. *WHO Solidarity Trial* tersebut sudah terbukti di lebih dari 90 negara dan Indonesia menjadi bagian dari *WHO Solidarity Trial* tersebut.

Tetapi, alat-alat kesehatan dan bahan baku yang diperlukan harus di datangkan dari luar Indonesia. Masalah menjadi bertambah karena tidak hanya Indonesia yang membutuhkan barang-barang tersebut, hampir seluruh negara juga membutuhkannya. Hal tersebut kemudian menciptakan persaingan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Pengiriman pesanan yang sudah lama juga terhambat karena keadaan ini.

Bahkan, ada negara-negara yang mulai cenderung tidak peduli dengan negara lain dan hanya melindungi negaranya sendiri dengan melarang warga negara yang sedang berada di

luar negeri untuk kembali ke negara asal. Makin mengkhawatirkan karena urusan penyebaran virus tersebut dibaur dengan urusan politik dunia dan rivalitas politik global yang masih terus muncul. "Intinya tantangan yang dihadapi sangat besar, banyak, dan komplis," tutur Retno.

Mengutip Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (9/4), telah mengingatkan tiga hal yang harus menjadi perhatian agar pandemi COVID-19 tidak meluas menjadi isu keamanan. Pertama adalah kemampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, diperlukan kebijakan yang tepat agar isu kesehatan tidak bergeser menjadi isu keamanan dan dapat menyebabkan kecurigaan masyarakat terhadap institusi negara.

Selanjutnya masyarakat internasional perlu dan harus terus memperhatikan konflik kemanusiaan yang sampai saat ini terus berlangsung. Terhambatnya penyelesaian konflik kemanusiaan akibat COVID-19 dapat menimbulkan rasa putus asa dan dapat mengundang pihak-pihak dari luar untuk masuk dan memperburuk konflik kemanusiaan tersebut yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan baru. Terakhir adalah perlunya menghindari politisasi isu COVID-19 agar tidak semakin memperkeruh suasana.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi ekonomi. International Monetary Fund (IMF)

memprediksikan bahwa ekonomi global akan menghadapi krisis terhebat sejak *The Great Depression* 91 tahun yang lalu, dengan prediksi penyusutan ekonomi menjadi -3% pada 2020. Selanjutnya Retno menyampaikan skenario ekonomi Indonesia dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Ekonomi Indonesia dalam scenario baik akan turun menjadi 2,3%, tetapi dalam scenario terburuk bisa menjadi -0,4%. "Angka ini menjadi pengingat bagi kita semua, dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh semua negara termasuk Indonesia akan cukup signifikan," kata Retno.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melakukan beberapa langkah diplomasi untuk mengatasi pandemi ini yakni bekerja sama dengan 83 pihak baik pemerintah, organisasi internasional dan LSM internasional. Kemudian turut dalam KTT ASEAN dan ASEAN PLUS THREE (APT) yang menghasilkan komitmen solidaritas, kerja sama, dan sinergi ASEAN; memaksimalkan kerja semua

mekanisme ASEAN dan APT; serta usulan kerjasama baru. Kemlu RI juga turut dalam G20 yang menghasilkan komitmen kerja sama, Injeksi Stimulus Ekonomi, memperkuat *global financial net*, berbagi pengalaman dalam penanganan COVID-19, serta membantu negara berkembang *Least Developed Countries* (LDCs).

Selanjutnya dalam mengatasi keadaan ini pada 2 April 2020, berdasar pada alur Sidang Umum PBB, Kemlu RI bersama beberapa negara lain melakukan co-inisiasi resolusi mengenai kerja sama penanganan COVID-19. Hal tersebut sudah diadopsi oleh Sidang Umum PBB dan merupakan adopsi pertama secara virtual yang dilakukan oleh Sidang Umum PBB pada masa pandemi ini.

Langkah lain Kemlu RI adalah dengan diplomasi Indonesia bekerja sama dalam perolehan alat kesehatan, mendorong ekonomi global tetap bergerak, dan menjaga stabilitas. "Kita berusaha mencari inovasi sehingga kerjasamanya adalah kerja sama yang saling menguntungkan," kata Retno.

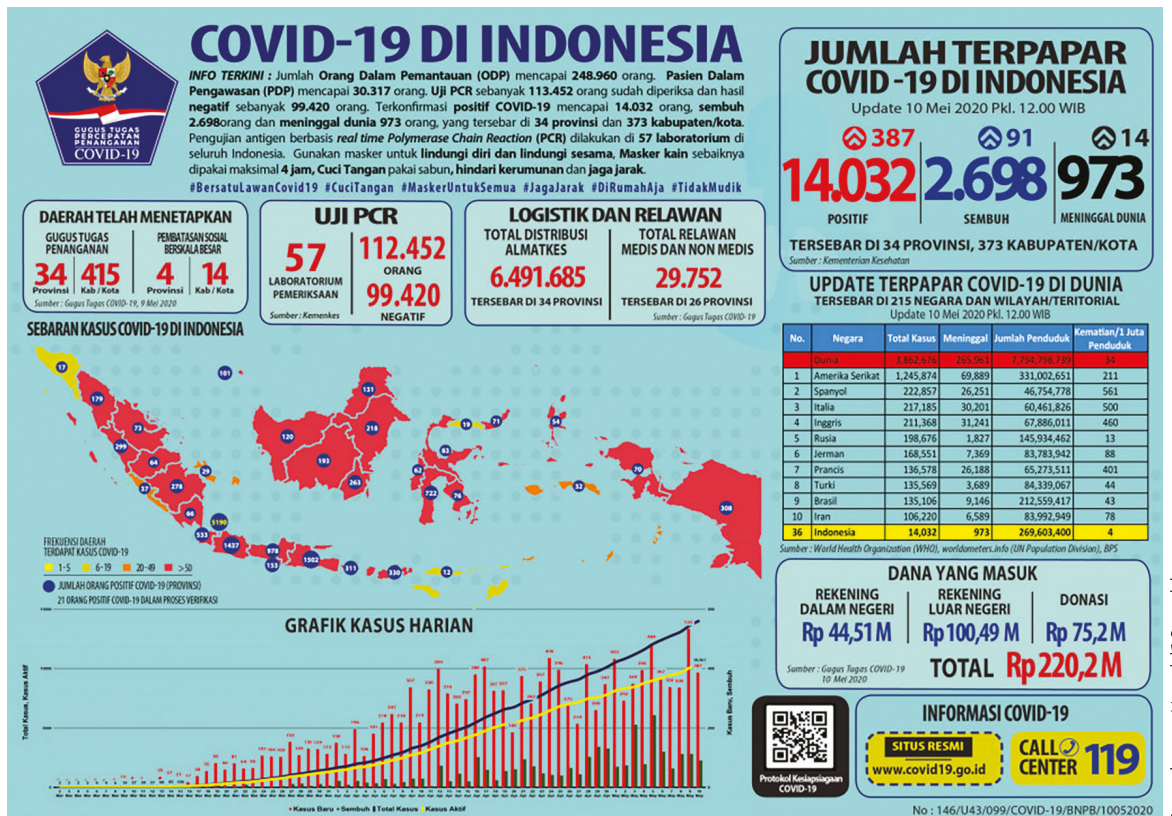


Foto: <https://covid19.go.id>



## Tanoto Foundation Percayakan Lemhannas RI dalam Menyalurkan Sejumlah APD

Tanoto Foundation dan Lemhannas RI sedikit banyak memiliki persamaan fungsi dan peran yakni sama-sama bergerak dalam bidang pendidikan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM)

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

**Foto.**  
humas-lhn

Lemhannas RI mendapatkan kepercayaan oleh Tanoto Foundation untuk menyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa 500 baju pelindung diri dan 5000 masker. Penyerahan APD tersebut dilakukan secara simbolik dan hanya dihadiri oleh beberapa pejabat struktural Lemhannas RI dan perwakilan Tanoto Foundation pada Senin (20/4) di Ruang Nusantara.

“Izinkan kami menghaturkan ucapan terima kasih, saya mewakili Tanoto Foundation, berkesempatan untuk mendukung pemerintah secara langsung untuk memberikan APD dalam hal ini berupa 500 baju pelindung diri dan 5000 masker,” kata

Director of External Affairs Tanoto Foundation, Ari Gudadi.

Ari juga menyampaikan harapannya semoga dukungan tersebut dapat dimanfaatkan Lemhannas RI, para personel, dan pihak lain yang membutuhkannya. “Kami tentunya berharap semoga wabah pandemi COVID-19 dapat berakhir sehingga kita semua dapat melanjutkan pembangunan bagi Indonesia tercinta,” ujar Ari.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation atas kepercayaannya untuk bisa menyalurkan bantuan ini melalui Lemhannas RI dan mendistribusikan sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Lemhannas RI kepada pihak yang paling memerlukan,” kata Gubernur

Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Pada kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa sudah jelas bahwa pandemi tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan banyak bahkan hampir semua negara di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah keadaan yang harus ditanggulangi bersama dan tidak dapat ditanggulangi sendiri baik dalam komponen sistem nasional maupun sistem internasional. Hal ini merupakan tantangan kemanusiaan.

“Bagi Lemhannas RI yang memiliki inti materi tentang Ketahanan Nasional dan 4 Konsensus Dasar Bangsa, keadaan ini banyak memberikan pelajaran bagaimana bereaksi terhadap sebuah keadaan yang bersifat mendadak,” kata Agus. Semakin tidak adanya sistem yang siap dan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan baik perubahan gradual maupun perubahan mendadak, semakin banyak pendadakan strategis yang akan dihadapi. Maka menurut Agus kedepannya harus digali suatu sistem nasional yang mampu dan memiliki fleksibilitas dalam merespon suatu keadaan.

Selanjutnya Agus menyatakan bahwa akan banyak pelajaran yang dapat diambil dari bagaimana menghadapi dan merespon keadaan saat ini dalam menanggulangi ancaman yang ada. Masa ini juga menjadi peluang untuk melakukan studi banding dalam mencari solusi, mengenal kelemahan yang dimiliki, dan praktik-praktik terbaik dilihat dari perbedaan-perbedaan respon antara satu negara dengan negara lainnya.

Tanoto Foundation dan Lemhannas RI sedikit banyak memiliki persamaan fungsi dan peran yakni sama-sama bergerak dalam bidang pendidikan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat hal tersebut saat mengakhiri sambutannya Agus menyampaikan harapan supaya kerja sama ini menjadi awal yang baik untuk membuka kesempatan kerja sama selanjutnya yang lebih panjang dalam rangka membangun bangsa dan negara.

Melansir dari laman situsnya, Tanoto Foundation adalah organisasi filantropis independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei

Tanoto berdasarkan keyakinan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensi penuhnya. Tanoto Foundation memulai kerjanya pada 1981 ketika pendirinya mendirikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Besitang, Sumatera Utara. Program Tanoto

Foundation berasal dari keyakinan bahwa pendidikan berkualitas mempercepat kesempatan yang sama dengan memanfaatkan kekuatan transformatif dari pendidikan untuk mewujudkan potensi penuh orang dan meningkatkan kehidupan.





## Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Berdasarkan Pengetahuan dan Kompetensi, serta Terintegrasi

Pentingnya memperhatikan berbagai implikasi sosial yaitu jaga jarak, menghindari kerumunan, memutus rantai penularan, yang mungkin semua hal tersebut membuat interaksi sosial yang selama ini dibangun terasa seperti terputus, namun hal tersebut harus dilakukan.

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

**Foto.**  
humas-lhn

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam Diskusi Online yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pada Senin (27/4), dengan tema “Ketahanan Nasional Indonesia, Mampukah Atasi COVID-19?”.

Diawal penjelasannya, Agus menyampaikan pengertian pertahanan, keamanan, dan ketahanan. Pertahanan secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman dari luar negeri dan bersifat militer. Sementara keamanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri

dan merupakan wilayah yuridis serta ancaman datang dari dalam negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri pada hakikatnya adalah pelanggaran hukum, maka dapat direspon dengan penegakan hukum. Sedangkan ketahanan, yaitu daya tahan suatu bangsa dan akan lebih tepat dikategorikan di dalam lingkup dan materi keamanan insani yakni ancaman yang mengancam warga negara secara individual. Ancaman nonfisik, seperti COVID-19, termasuk dalam lingkup ketahanan.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional diwujudkan dari dua pendekatan yakni Pendekatan Gatra dan Pendekatan Spasial



Geografis. Pendekatan Gatra terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan, dimana ketahanan tiap gatra akan mempengaruhi ketahanan nasional. Pendekatan lainnya yaitu Pendekatan Spasial Geografis yang dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi atau daerah.

Ketahanan gatra tersebut diolah dan dijadikan kebijakan publik. Kebijakan publik yang dihasilkan akan menjadi kebijakan publik terpadu untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka menangani COVID-19. "Ketahanan nasional bukan disiplin ilmu tersendiri, tetapi sebetulnya merupakan *outcome* keadaan yang dihasilkan apabila gatra ketahanan itu semuanya baik. Ketahanan nasional dibangun dari berbagai disiplin ilmu lainnya," kata Agus.

Ketahanan nasional ditengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Agus tidak memungkiri bahwa setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak, pasti ada yang sependapat dan kurang sependapat. Agus menegaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah demokrasi, menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah jika semua gagasan dan tanggapan yang diberikan didasarkan pada konsensus dasar bangsa.

Terkait kriteria kebijakan publik dalam menangani COVID-19,

Agus berpendapat bahwa kriteria pertama adalah perlu memahami karakteristik COVID-19 agar dapat melakukan pencegahan penularan dan perawatan penyembuhan. Agus juga menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya sejumlah tenaga medis yang bertugas. "Gugurnya tenaga medis adalah kehilangan strategis yang cukup besar bagi bangsa, karena untuk mencetak seorang tenaga medis memerlukan waktu yang tidak sedikit," kata Agus.

Kriteria selanjutnya, menurut Agus adalah memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan yakni tempat isolasi mandiri, Rumah Sakit, peralatan medis, tenaga medis, dan obat-obatan. Kemudian Agus menyampaikan pentingnya memperhatikan berbagai implikasi sosial yaitu jaga jarak, menghindari kerumunan, memutus rantai penularan, yang mungkin semua hal tersebut membuat interaksi sosial yang selama ini dibangun terasa seperti terputus, namun hal tersebut harus dilakukan.

COVID-19 yang memaksa penutupan beberapa sektor pekerjaan berdampak pada keadaan ekonomi, terlebih pada masyarakat yang biasanya mengandalkan sumber penghasilan harian. Oleh karena itu, langkah pemerintah adalah dengan pemberian bantuan sosial. Sektor keamanan juga memerlukan peningkatan untuk mencegah tindak kriminal dan menegakan peraturan perundang-undangan.

Faktor sukses dan efektifnya sebuah kebijakan publik adalah kebijakan nasional yang terpadu, mencakup level horizontal artinya lintas sektor dan level vertikal yakni keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, juga melakukan perhitungan kemampuan anggaran dengan menentukan skala prioritas yang tajam dan pertimbangan risiko. "Pembuatan kebijakan publik harus berdasarkan pada pengetahuan dan kompetensi serta harus terintegrasi," kata Agus.



Foto: tribunnews.com



## Tjahjo Kumolo: Siapapun Pimpinannya, Birokrasi Harus Profesional

Foto: www.positivemindfulleader.com

Pengambilan keputusan dan transformasi digital semakin dituntut memiliki standar sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berdaya.

---

### Tjahjo Kumolo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

---

**P**eningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikaitkan dengan penyederhanaan birokrasi semata-mata untuk membangun sebuah proses pengambilan keputusan yang cepat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat memberikan materi “Strategi Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik” kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Selasa (28/4).

Munurut Tjahjo, saat ini alur pengambilan keputusan di Indonesia sangat panjang. Kini Indonesia sekilas terlihat seperti negara peraturan dengan banyaknya aturan yang saat ini ada, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah. Tjahjo menyampaikan bahwa banyaknya peraturan tersebut sedikit banyak dapat menghambat proses

pertumbuhan. Untuk menangani hal tersebut, maka penyederhanaan birokrasi dirasa dapat menjadi upaya untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi dan komunikasi yang lebih fleksibel.

Menyederhanakan birokrasi juga merupakan respon pemerintah terhadap tantangan-tantangan global yang saat ini dihadapi. Kini, pengambilan keputusan dan transformasi digital semakin dituntut memiliki standar sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berdaya. Kemudian Tjahjo menyampaikan siapapun yang menjadi pimpinan dan dengan latar belakang apapun, harus menciptakan birokrasi yang profesional. “Siapapun yang menjadi pimpinan, ditingkat manapun, birokrasi harus profesional dan melayani masyarakat,” tutur Tjahjo.

*Road Map* reformasi birokrasi saat ini memiliki beberapa tujuan dan sasaran yakni adanya ukuran keberhasilan, strategi, program kegiatan, serta organisasi pengelola

reformasi birokrasi yang minimal dipersiapkan untuk jangka pendek yakni 5 tahun kedepan. “Sekarang sudah ada reformasi birokrasi, tapi hanya kulit-kulitnya. Bertahap untuk sampai langsung ke jantungnya,” ujar Tjahjo.

Hal tersebut bertujuan terciptanya skala prioritas bagi setiap instansi yakni perbaikan tata kelola yang harus sesuai karakteristik, isu, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tjahjo juga menekankan bahwa *road map* tidak boleh bersifat hanya untuk formalitas.

“Pengolahan reformasi birokrasi kedepan akan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Tjahjo. Kolaboratif yang dimaksud adalah kolaboratif baik secara vertikal, maupun horizontal. Kolaboratif vertikal adalah melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintah. Kolaborasi pemerintah yang utuh antara sipil, TNI, dan Polri secara keseluruhan akan mampu mempercepat proses penjabaran pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada. Di sisi lain, kolaboratif horizontal adalah melibatkan antara Kementerian dan Lembaga terkait dengan unsur luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Selain mengolah reformasi birokrasi secara kolaboratif, Menpan RB juga akan melakukan evaluasi tahunan kepada setiap instansi. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk memetakan tahapan-tahapan kemajuan setiap instansi dan mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki. Evaluasi tersebut juga akan menjadi barometer pengukur kecepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh instansi.

Pada kesempatan itu Tjahjo juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama adalah radikalisme dan terorisme. Menurut Tjahjo untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani mengambil sikap tegas untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan pada kelompok yang menyimpang dari ideologi



## **Dengan birokrasi yang kuat, kita bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat disemua tingkatan dengan baik dan bisa mencegah hal-hal yang menjadi ancaman**

negara. Selanjutnya adalah tantangan memberantas narkoba, karena narkoba kini sudah mulai berada dititik yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

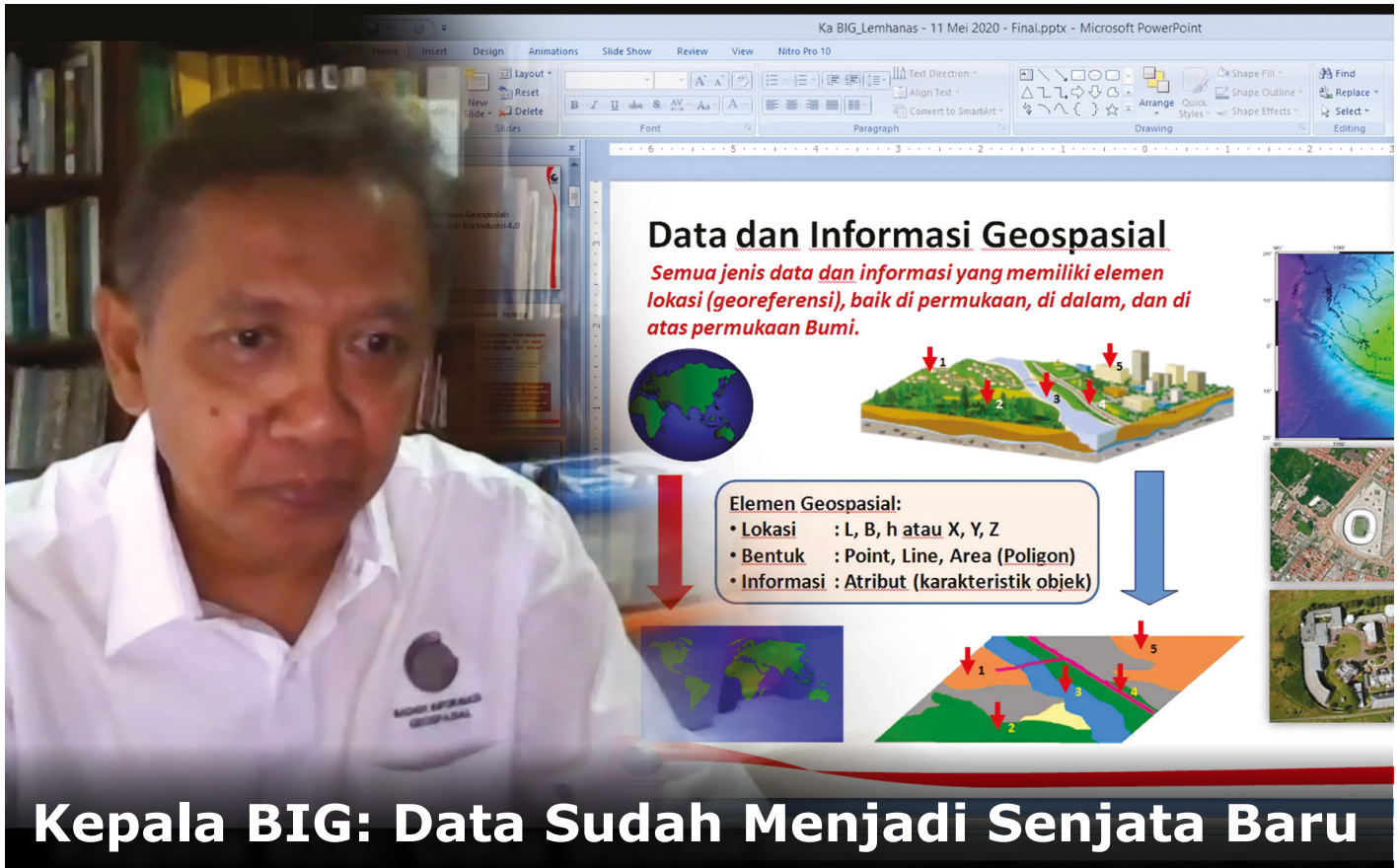
Kemudian tantangan lainnya adalah korupsi. Walaupun dirasa sudah ada strategi penanganan yang baik, namun masih harus dicari titik masalah sehingga korupsi bisa benar-benar dihilangkan. “Tantangan terakhir bisa muncul setiap saat yaitu bencana alam,” kata Tjahjo. Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang kini menjadi wabah di hampir seluruh

negara di dunia bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari tantangan tersebut, karena tidak ada yang memprediksi hal ini akan terjadi.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa tantangan tersebut bisa diatasi dengan memperkuat birokrasi. Untuk itu dibutuhkan SDM yang profesional, yang siap pakai, dan yang bisa cepat mengambil keputusan. “Dengan birokrasi yang kuat, kita bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat disemua tingkatan dengan baik dan bisa mencegah hal-hal yang menjadi ancaman,” pungkas Tjahjo.



Foto: humas-lln



fungsi strategis informasi geospasial untuk pembangunan nasional adalah untuk peta kebijakan dan Satu Data Indonesia yang akan menciptakan keberlanjutan ekonomi inklusif, kesetaraan sosial, lingkungan yang layak ditinggali.

**Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc.**  
Kepala Badan Informasi Geospasial

**Foto.**  
humas-lhn

**S**iapa yang menguasai data, dialah yang menguasai gelanggang, semakin banyak data yang dimiliki maka akan semakin kuat.

Dewasa kini, data sudah menjadi semacam senjata baru, tanpa data akan sulit untuk bergerak” kata Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc. saat memberikan ceramah pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 tentang Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, pada Senin (11/5).

“Kedaulatan geospasial Indonesia masih harus diperjuangkan” kata Hasan. Karena fungsi strategis

informasi geospasial untuk pembangunan nasional adalah untuk peta kebijakan dan Satu Data Indonesia yang akan menciptakan keberlanjutan ekonomi inklusif, kesetaraan sosial, lingkungan yang layak ditinggali. Hasan juga menegaskan bahwa saat ini Informasi geospasial tidak bisa lepas dari revolusi industri 4.0.

Informasi geospasial dalam pembangunan berkelanjutan menjadi konektor antara data-data sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanpa atribut data dan informasi, secara umum kerap kurang bermakna dan menyulitkan pengambilan keputusan. Karena hal tersebut berkaitan satu sama lain, yakni data (jarak, sudut, ketinggian, kedalaman, koordinat) diolah menjadi informasi (jaringan kontrol koordinat, peta dasar, peta

tematik) yang kemudian diolah menjadi pengetahuan (geodesy, geomatics, geography, geosciences) yang akhirnya menghasilkan kebijakan (pembangunan berkelanjutan, pengelolaan SDA, mitigasi dan adaptasi bencana, pertahanan dan keamanan negara). “Mengumpulkan data, lalu menganalisis, lalu mengambil keputusan,” tutur Hasan.

“Kalau data salah, kebijakan yang diambil bisa salah,” kata Hasan. Menurut Hasan, bagi Indonesia yang rentan bencana alam, informasi geospasial diperlukan untuk mendukung berbagai tahapan manajemen pengurangan risiko bencana alam. Informasi geospasial menjadi jaringan informasi geospasial nasional yang menjadi landasan pengelolaan pengurangan risiko bencana.

Kemudian Hasan menjelaskan mengenai Satu Data Indonesia, yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antara instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. “Data pemerintah harus akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dibagipakai, mudah diakses, dan terpadu,” kata Hasan.

Satu Data Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis data, yakni data statistik, data geospasial, data keuangan negara, serta data lainnya seperti data kesehatan, data pendidikan, dan data informasi hukum. Arus besar data yang diatur dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan data penting untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, BIG memegang peranan penting dalam satu data Indonesia agar data dan informasi geospasial dapat diintegrasikan dengan data statistik dan data lainnya. “Segala sesuatu harus terintegrasi” tutur Hasan.

Selanjutnya Hasan menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia memiliki 4 prinsip. Prinsip pertama adalah satu standar data, yakni standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi,

ukuran, dan satuan.

Selanjutnya adalah satu meradata baku, yaitu informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat dengan mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali. Kemudian interoperabilitas, yakni kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagipakai antarsistem yang saling berinteraksi. Terakhir adalah referensi data, dimana data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia diportal satu data.

Prinsip tersebut untuk memastikan data yang diproduksi oleh produsen data adalah data yang berkualitas yakni sesuai standar, metadata baku dari pembina data, serta dihasilkan menggunakan kode referensi dan data induk yang dapat dimanfaatkan bersama.



Foto: www.allbusiness.com

# Keluarga Sebagai Kekuatan Sosial Dalam Mendukung Ketahanan Nasional

**K**epala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Surya Chandra Surapaty, M.PH., Ph.D. memberikan ceramah mengenai Keluarga Berencana untuk Ketahanan Nasional, kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Rabu, (13/5).

“Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang sangat strategis dalam rangka memajukan kesejahteraan sebuah populasi,” kata Surya. Lebih lanjut Surya menjelaskan bahwa keluarga dan penduduk memang seiring, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Keluarga karakternya data mikro, sedangkan penduduk karakternya data makro. Bisa dikatakan bahwa keluarga mempengaruhi penduduk suatu negara.

Di Indonesia sendiri, keluarga memiliki arti penting dalam pembangunan bangsa. Arti penting tersebut karena keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat lebih berdaya guna dalam membentuk karakter penduduk. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada kualitas keluarga. Selain itu, keluarga Indonesia dapat dikatakan berbeda dengan negara-negara lain karena mempunyai



Foto: faktabanten.co.id

kekuatan emosional lebih dibandingkan negara lain.

Memiliki kekuatan emosional yang kuat, membuat beberapa masalah lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan keluarga, seperti masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebetulnya titik dasarnya ada di keluarga. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh beberapa karakteristik keluarga di Indonesia, yakni hidup dengan Pancasila, suka gotong royong, lebih banyak hidup berjamaah, kerukunannya tinggi, dan memiliki toleransi yang tinggi.

“Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat bisa menjadi bagian penting dari *social power* yang merupakan salah satu pendukung ketahanan nasional,” tutur Surya. Menurut Surya, jika kualitas keluarga bagus maka ketahanan akan menjadi lebih kuat.

Pada kesempatan tersebut, Surya juga menjelaskan mengenai bonus demografi. Surya menyatakan bahwa bonus demografi bergantung

pada kualitas SDM. Jika yang terjadi adalah SDM mengalami *stunting*, tidak lulus sekolah, banyak kematian ibu dan bayi, tingginya angka penderita sakit, serta banyak pengangguran, maka bonus demografi tidak dapat dinikmati. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kualitas SDM unggul, memiliki pendidikan yang tinggi, angka kesehatan tinggi, dan produktif, maka bonus demografi dapat dinikmati. “Jangan sampai tertipu, secara struktur menjadi bonus tapi tidak mendapatkan hasil,” kata Surya.

Surya juga menjelaskan salah satu upaya dalam menciptakan SDM yang unggul, yaitu dengan peran kontrasepsi dalam mengatur jarak antarkelahiran minimal 33 bulan. Karena setiap SDM yang unggul dan kuat harus disiapkan sejak sebelum kehamilan. “Membangun keluarga berkualitas penting dimulai dari membangun generasi yang unggul, kualitas SDM yang tinggi, dan meningkatkan ketahanan nasional,” ujar Surya.



## Lemhannas RI Peringati HUT ke-55 dan Hari Kebangkitan Nasional

Jiwa dan semangat kebangkitan nasional inilah, yang seharusnya senantiasa dipedomani dan dipahami oleh seluruh jajaran dan keluarga besar Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan pengabdianya,

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

**Foto.**  
humas-lhn

**L**embaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Lemhannas RI, pada Rabu, (20/5) di Ruang Nusantara, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut juga sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 20 Mei.

Dalam kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa secara tersirat alasan Lemhannas RI diresmikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional karena jiwa dan semangat perjuangan Lemhannas RI merupakan semangat kebangkitan nasional yang mampu mendorong bangkitnya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam kebhinnekaan dan sebagai bangsa yang merdeka,

berdaulat, dan bermartabat. “Jiwa dan semangat kebangkitan nasional inilah, yang seharusnya senantiasa dipedomani dan dipahami oleh seluruh jajaran dan keluarga besar Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan pengabdianya,” ujar Agus Widjojo.

Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa memasuki tahun 2020 ini, Indonesia dihadapkan pada konflik di Perairan Natuna dan bencana banjir di beberapa wilayah. Kemudian memasuki bulan Maret 2020 Indonesia dilanda Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 15.000 kasus dan membuat beberapa daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pandemi COVID-19 juga membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin menurun dan membuat banyak sektor usaha mengalami kerugian dan terpaksa melakukan pemotongan upah kerja

bagi beberapa karyawan, atau bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah mulai aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Selain itu, angka kesembuhan pasien di Indonesia juga meningkat dan tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke-55 Lemhannas RI yakni “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Bangun SDM Unggul Indonesia Maju” memiliki relevansi dengan situasi dan kondisi nasional saat ini. “Bersama tema ini, dan dengan berlandaskan semangat kebangkitan nasional, Lemhannas RI melalui peran dan fungsinya, ingin menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan virus COVID-19,” kata Agus Widjojo.

Agus Widjojo juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh personel Lemhannas RI atas kerja keras dan berbagai capaian serta prestasi yang diraih Lemhannas RI. Namun, tetap harus disadari bahwa Lemhannas RI masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. “Lemhannas RI harus semakin peka dalam merespons berbagai dinamika kehidupan nasional dan beradaptasi dengan ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang terkait dengan peran Lemhannas RI ke depan,” tutur Agus Widjojo.

Pada akhir amanatnya, Agus Widjojo mengingatkan kepada seluruh personel Lemhannas RI beberapa hal yang harus dipedomani. Hal pertama adalah memegang teguh dan mempertahankan cita-cita luhur dan marwah Lemhannas RI sebagai pengawal jati diri, karakter dan persatuan bangsa berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa. Selanjutnya, menjaga komitmen dan konsistensi pengabdian Lemhannas



RI dengan memperkuat soliditas dan kebersamaan berdasarkan semangat kegotongroyongan.

Kemudian, mengembangkan budaya pemikiran strategis yang menjangkau keluar (*outward looking*) dengan tetap berpedoman pada jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Terakhir adalah mencermati dan menyikapi secara cerdas berbagai isu aktual yang berkembang, agar Lemhannas RI tidak terjebak dalam penyebaran berita bohong yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat.

Upacara tersebut hanya dihadiri oleh beberapa pejabat struktural, pejabat fungsional, perwakilan personel dan peserta PPR 60 serta PPR 61. Sedangkan sejumlah personel Lemhannas RI lainnya mengikuti upacara secara dalam jaringan (*daring*). Hal tersebut dilakukan demi menjaga *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), namun tentunya tidak mengurangi kekhidmatan dalam melaksanakan upacara.

**alasan Lemhannas RI diresmikan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional karena jiwa dan semangat perjuangan Lemhannas RI merupakan semangat kebangkitan nasional yang mampu mendorong bangkitnya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam kebhinnekaan dan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.**





## Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi COVID-19

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono memberikan pernyataan dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pada Senin, (1/6) 2020.

Dalam Konferensi pers tersebut, Agus menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, Agus menyampaikan bahwa Pancasila selain mengatur substansi nilai-nilai yang menyatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga secara sadar mencari kesepakatan untuk menemukan kaidah yang merespon ciri masyarakat yang berkarakteristik memiliki komposisi kebhinekaan. Kedua aspek tersebut menjadi kaidah pemerintah dalam keadaan darurat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini.

Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi

kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan.

Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan

nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. “Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-10,” ujar Agus.

Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa masing-masing komponen dalam masyarakat memiliki peran untuk berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Bagi masyarakat umum setidaknya dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, tetap di rumah, dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Menurut Agus, tenaga kesehatan mengorbankan jiwa dan raga miliknya untuk menyelamatkan jiwa lain. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan.

Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi lokal, larangan berpergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakekatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional.

“Oleh karena itu, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila,” ujar Agus.



## Agus Widjojo: Mengukur Nilai-Nilai Pancasila Harus dari Wujud Konkret

Bahwa dalam mencapai tujuan nasional diperlukan kebijakan yang berdasarkan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**  
Gubernur Lemhannas RI

**Foto.**  
humas-lhn

**N**amun, hal tersebut tidak mengurangi kualitas program pendidikan. Karena diyakini bahwa efektivitas proses belajar mengajar dalam sebuah program pendidikan implementasi sebuah kurikulum tidak ditentukan oleh tenaga pengajar, tetapi bagaimana para peserta mengejar ilmu,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ketika menjadi salah satu narasumber pada Sarasehan Kebangsaan Collab4Unity yang mengangkat tema “Amplifikasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Tameng

Bangsa Menghadapi Tantangan dan Dampak Covid-19” pada Selasa (2/6).

Dalam sarasehan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa ditengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI terus menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kewenangan konstitusional yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional. Dalam menjalankannya, Lemhannas RI memang melakukan inovasi dan improvisasi yakni sepenuhnya melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring). Adapun materi, substansi, atau konten kurikulum, tetap berada pada alurnya dan sama dengan program pendidikan sebelumnya.

Namun, Lemhannas RI harus menyesuaikan beberapa kurikulum dan kegiatan yang sudah direncanakan dan terpaksa ditiadakan seperti Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), *Outbound*, dan Olah Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Di sisi lain, kegiatan pemantapan nilai-nilai terpaksa tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya, sedangkan kegiatan pengkajian masih dilakukan dengan membuat kajian untuk direkomendasikan kepada pemerintah.

“Ketahanan nasional bukan merupakan disiplin ilmu sendiri, sebetulnya merupakan *outcome* upaya dalam rangka pencapaian tujuan nasional,” tutur Agus. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang diperlukan agar bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, dibutuhkan 2 pendekatan yaitu pendekatan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dan pendekatan spasial geografis yakni gatra tiap-tiap provinsi.

Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan nasional diperlukan kebijakan yang berdasarkan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting yang perlu disadari adalah bagaimanapun demokrasi memberikan kebebasan untuk berpendapat, semua pendapat harus didasarkan pada 4 Konsensus Dasar Bangsa. "Segala sesuatu kebebasan yang berasal diluar konsensus dasar, perlu kita curigai adalah upaya untuk merubah konsensus dasar," tutur Agus.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa mengukur nilai-nilai Pancasila harus dari wujud konkret yang dapat

diukur dari lapangan dan harus jujur dalam mengukur kondisi tersebut. Mencari wujud konkret nilai-nilai Pancasila untuk pengukuran juga berarti mencari indikator-indikator terukur yang harus memenuhi syarat, yakni harus konkret dan nyata, berdasar kerangka pengetahuan, menilai dengan jujur, dan terdapat nilai integratif antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Menurut Agus, jangan mengukur nilai hanya dari nomenklatur yang sifatnya abstrak yang sifatnya idealis normatif. "Kemudian diperbandingkan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi nyata di lapangan," kata Agus. Dengan memperbandingkan dua kondisi tersebut bisa terlihat apakah implementasi dari sila-sila Pancasila

dalam keadaan baik, cukup baik, kurang, atau keadaan lainnya.

Menurut Agus, ada beberapa kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi pertama adalah terdapat kepercayaan yang kuat antara semua pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya adalah kondisi yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga negara, misalnya hak kebebasan berpendapat dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Kemudian kebijakan pemerintah yang mudah dan jelas dimengerti masyarakat. Terakhir adalah dalam rangka kebijakan, yaitu keterkaitan antara kewenangan, data, dan ketentuan pelaksanaan.

## **Ketahanan nasional bukan merupakan disiplin ilmu sendiri, sebetulnya merupakan outcome upaya dalam rangka pencapaian tujuan nasional**



Reni Mayerni,

# Jalani Karirnya dengan Sepenuh Hati



---

**Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.**  
Deputi Pengkajian Strategik  
Lemhannas RI

---

**Foto.**  
humas-lhn

---

**L**ahir dari keluarga minang, Reni yang merupakan sulung dari dua bersaudara berasal dari sebuah daerah kecamatan Tilatang Kamang, Sumatra Barat. Ayahnya yang merupakan seorang dato' namun memiliki pemahaman moderat. Sementara ibunya merupakan pegawai kecamatan dan pegawai perempuan satu-satunya. Inilah mengapa kedua orangtuanya sangat demokratis dalam mendidik anak-anaknya.

Reni mengaku setiap ada pertemuan keluarga pun, ayahnya menghendaknya turut hadir meski

dalam adat istiadatnya seorang anak perempuan tidak lazim untuk ikut hadir. "jadi tidak ada halangan antara anak perempuan sama anak laki-laki", ungkapnya.

Reni juga mengungkapkan bahwa memang kebiasaan adat istiadatnya seringkali seorang anak perempuan lazimnya membantu pekerjaan rumah, namun ayah dan ibunya selalu mengatakan untuk belajar saja.

Masa kecil Reni dapat dibilang "merdeka" dari kebiasaan seorang anak perempuan biasanya kala itu. Bahkan, Reni sempat terpilih mewakili kecamatan untuk mengikuti Jambore tingkat Asia Pasifik di Jakarta pada tahun 1981, meski pada saat itu juga

banyak orang yang melarangnya pergi dengan alasan Reni seorang anak perempuan. Namun dengan segala keyakinan dan kepercayaan dari kedua orangtuanya bahwa Reni kecil dapat menjaga dirinya, akhirnya berangkat ke Jakarta.

Disaat SMP, Reni merupakan salah satu siswi berprestasi. Selain berprestasi pada satu kelasnya, ia juga berprestasi pada satu angkatan kelas (Red: misal, gabungan kelas 1A – 1E). “saya pernah juara satu di kelas, juara satu sama-sama di kelas 1. Dan itu kalau gak juara 1, ya juara 2”, kenang Reni.

Berbekal prestasi tersebutlah yang mengantarkan Reni masuk ke salah satu SMA 1 Negeri yang menjadi salah satu SMA favorit dan unggulan di Bukittinggi. Seperti halnya pada masa SMP, masa SMA-nya, Reni mengaku melaluinya dengan sangat menyenangkan.

Usai lulus SMA, Reni memiliki keinginannya menjadi Dokter yang merupakan cita-cita di masa kecilnya, namun pada kenyataannya malah masuk ke bidang pertanian di Universitas Andalas. “Dulu, waktu memilih pertanian itu *by accident* sebenarnya. Saya gak tahu jurusan Agronomi itu apa, hanya melihat namanya terlihat bagus saja, tidak melihat fakultasnya, fakultas apa? Saya baru menyadarinya ketika sudah lulus di Agronomi yang ternyata di fakultas pertanian,” ungkap Reni.

Diawal masuk perkuliahan, Reni yang telah terbiasa mandiri dan menentukan sendiri apa yang diinginkannya, mengaku pada saat itulah ia memiliki keinginan untuk meningkatkan potensi dirinya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan diantaranya kegiatan organisasi dan modeling. “Rasanya waktu itu, pulang hanya untuk mandi dan tidur. Setiap harinya setelah selesai jam perkuliahan pasti ada kegiatan diluar,” ucapnya. Bagi Reni saat itu, harus punya kegiatan yang membuatnya bahagia dan harus “*balance*” antara kuliah dengan kegiatan.

Sekitar tahun 1986-an, Reni juga sudah mulai menulis di salah satu koran ternama di Padang. “Saat itu, mahasiswa masih belum banyak menulis. Saya coba menulis “Remaja di Lampu Merah” dan “Tabulampot”, Tanaman buah dalam pot,” sambungnya.

Ada satu peristiwa yang memacu Reni ingin terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika saat mengurus surat keterangan lulus ada salah satu mahasiswa senior yang “*underestimate*” dirinya yang tidak mengira ternyata Reni telah menyelesaikan ujian skripsinya yang akhirnya dapat menyelesaikan S1 nya dengan waktu yang terbilang cukup cepat saat itu, yakni 3 tahun 11 bulan.

Menurut mahasiswa senior tersebut, Reni dimasa perkuliahannya terlihat sibuk dengan kegiatan di luar jam kuliah dan terkesan “hura-hura” serta kegiatan modelingnya yang membuat Reni sering muncul di koran kampus dan koran setempat.

Tak lama, Reni mengawali karirnya sebagai seorang dosen. Mulanya, Reni tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang dosen, justru malah ingin menjadi seorang pegawai bank. Namun ternyata nasib berkata lain, ketika dua hari setelah ujian akhir skripsi, Reni diajak teman seangkatannya yang juga sudah lulus ujian akhir untuk melamar menjadi dosen.

Saat itu, Reni bersama temannya yang kini juga telah menjadi salah satu Guru Besar di Universitas Andalas terbilang muda untuk mendaftar menjadi seorang dosen, sempat menjadi bahan “olokan” karena masih dianggap “anak-anak” oleh seniorinya.

Namun, siapa sangka Reni ternyata lulus untuk menjadi dosen dan karena saat itu Reni belum diwisuda, diminta untuk mengundurkan diri dan ikut tes kembali penerimaan dosen pada tahun depan. Kejadian itulah yang ternyata menjadikan Reni memiliki keinginan kuat untuk menjadi dosen.

Meski cukup berliku, karir Reni sebagai seorang dosen pun terbilang cemerlang. Namun tetap saja ada orang-orang yang masih memandang “sebelah mata”. Bahkan, ketika Reni telah menunjukkan prestasinya dalam mencapai gelar akademik di jenjang pendidikan S2 dan S3, masih saja ada orang yang “*underestimate*” dirinya.

Namun, sekali lagi anggapan “*underestimate*” kepada dirinya, disangkalnya dengan meraih prestasi yakni mendapatkan gelar Profesor di usia yang terbilang muda yakni 42 tahun, yakni empat tahun berselang ia menyelesaikan S3 nya di Universitas Padjajaran.

Menurut Reni yang juga pernah sebagai Ketua Dewan Juri Uda Uni Sumatera Barat, dengan gelar akademik yang diraihinya, sangat berat menjaganya. “Menjaga dari segi intelektualitas, moralitas, dan banyak sekali yang saya harus jaga,” imbuhnya.

Dengan kredibilitas dan kemampuan yang dimiliki Reni, membawanya menjadi Kepala Dinas Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Inilah kali pertamanya Reni terjun ke dunia birokrat setelah sekian lama berkecimpung di dunia akademik.



**Namun, sekali lagi anggapan “underestimate” kepada dirinya, disangkalnya dengan meraih prestasi yakni mendapatkan gelar Profesor di usia yang terbilang muda yakni 42 tahun,**



Karena kedekatan almamater antara Reni dengan Prof. Fashbir Noor Sidin, membawa Reni untuk ikut Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 21 Lemhannas RI. “Ketika ada pembukaan penerimaan peserta program pendidikan dari Lemhannas, saya ingat Prof. Fashbir yang saat itu menjadi salah satu Tenaga Ahli di Lemhannas RI. Beliau menyarankan saya untuk ikut saja. Selain dapat menambah wawasan juga bisa membangun *networking* pertemanan,” kata Reni.

Reni mengaku, saat itu belum dapat membayangkan apa-apa tentang Lemhannas RI. Reni hanya tahu ia akan sekolah selama 5,5 bulan. “Bahkan sampai hari pertama masuk ke Lemhannas RI, saya gak ngerti saya akan ngapain disini, tapi yang saya tahu bahwa disini akan sekolah selama lima bulan”, ucapnya.

Seminggu pendidikan di Lemhannas RI, sempat membuat Reni jatuh sakit dan stress. Namun berawal

dari Outbond peserta pendidikan di Lido justru membuat seorang Reni kembali kuat untuk menjalani pendidikan tersebut.

“Berawal karena saya tidak bisa berenang, semuanya tahu saya gak bisa berenang akhirnya semuanya kan meledek saya. Nah akhirnya disitulah semuanya ngeledak-ngeledak dan minta saya menjadi kuat selama 5,5 bulan itu. Belum lagi saya mendapat kepercayaan sebagai ketua seminar,” kenang Reni.

Bahkan saat itu, Reni juga dipercaya untuk bertanggung jawab sebagai ketua untuk membuat sejumlah produk PPSA 21, seperti Buku Pancasila, Buku Modul Kelas 1 hingga kelas 5 SD, dan Lagu Pancasila. “Belum lagi produk angkatan kami yang sejumlah produk. Semua tanggungjawabnya di saya sebagai ketuanya. Kawan-kawan saja yang membuat Taskap saja keteteran, apalagi saya yang harus membaca semua modul yang dibuat,” cerita Reni.

Reni mengaku sangat terharu ketika kawan-kawannya memberikan perhatian saat itu. “Jangan sampai uni sakit. Kemudian satu waktu ada yang bilang, tuh si uni kenapa murung, ajak jalan-jalan, ajak makan” ucap Reni menirukan beberapa kawannya. Menurut Reni, tidak ada tendensi apapun dalam bersahabat dengan kawan-kawan PPSA 21. “Itu murni karena persahabatan,” sambung Reni.

Namun perjuangan Ibu dari dua orang anak ini, menyelesaikan PPSA 21 Lemhannas RI akhirnya berbuah manis. “Ya Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan Taskap, melewati ujian dengan baik dan happy,” sambungnya.

Bagi Reni, mengikuti PPSA 21 itu sangat menyenangkan. “Walaupun saya tidak punya banyak waktu seperti kawan-kawan yang lain. Pergi kemana-mana, waktu kuliah itu kan banyak pergi, walapun saya ikut pergi, tapi ya tetap membawa laptop, sementara mereka tidak. Ya sampai hari ini kawan-kawan masih sangat mensupport,” tutur Reni.

Lantas Reni turut menceritakan awalnya bisa menjadi Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI. “Nah, kenapa bisa masuk ke Lemhannas, ya memang karena waktu itu ada *open bidding* untuk jabatan Deputy Pengkajian Strategik. Saya tidak pernah berpikir akan pindah ke Jakarta. Makanya pada saat PPSA 21 itu saya mengerjakan segala sesuatunya tanpa memikirkan apapun efek sesudah itu. Saya melakukannya dengan senang hati dan sepuh hati,” ungkap Reni.

Awalnya Reni ditawarkan untuk ikut *open bidding* Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI saat itu, Komjen Pol Arif Wachyunadi yang juga merupakan alumni PPSA 21, namun sempat ditolak.

Akhirnya, setelah beberapa waktu berpikir kembali dan sempat reuni dengan kawan-kawan PPSA 21 pada saat Hari Ulang Tahun Lemhannas di Jakarta pada tahun 2018, timbul keinginan Reni untuk mengikuti *open bidding* tersebut.

Kemudian ketika kembali ke Padang, Reni langsung mendaftar open bidding tersebut yang kemudian pada akhirnya berhasil menjadi seorang Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI dengan mengungguli beberapa pesaingnya.

Diawal menjabat Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Reni merasa harus melihat tongkat estafet kepemimpinan sebelumnya untuk memilih mana yang harus dilanjutkan mana yang tidak perlu.

“Melihat Lemhannas yang sudah ada selama ini, ada hal-hal yang masih harus tetap dilanjutkan. Misalnya Renstra, sebagian dari Renstra tersebut harus dilanjutkan. Karena apa? Ternyata, untuk menjadikan World Class Institution, tidak membutuhkan effort yang luar biasa, karena kita sudah punya sebagian besarnya. Misal kita sudah punya banyak kerjasama luar negeri, hanya saja harus meningkatkan dan memperluas kerjasama luar negeri tersebut.” tutur Reni.

Menurut Reni, cara untuk peningkatan dan perluasan kerjasama tersebut yaitu dengan menerapkan Good Governance dan Clean Government sebagai World Class Institution. Selain itu, tambah Reni adalah bagaimana dunia luar tahu tentang Lemhannas RI. Menurut Reni pun sebenarnya hal tersebut juga sudah dilakukan dengan membuka kesempatan pada negara sahabat untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pendidikan reguler di Lemhannas RI dan begitupun sebaliknya.

Kemudian, cara lain yang menurut Reni sedang

dikerjakan yaitu membuat Jurnal akreditasi dan berskala internasional. “Bagaimana memperkenalkan satu institusi ke luar ya melalui tulisan-tulisannya dan gagasan-gagasannya. Kita akan besar kalau gagasan kita disambut oleh banyak orang. Gagasan itu darimana? Tidak hanya dari seminar, tapi dari pemikiran-pemikiran yang ada dan bisa ditulis yaitu melalui Jurnal,” ucap Reni.

Dikaitkan dengan Jurnal, Reni menyinggung kegiatan Jakarta Geopolitical Forum (JGF). Menurutnya JGF saat ini yang telah memasuki tahun keempat, mulai sudah diperhitungkan oleh orang luar negeri. JGF tahun ini, Reni merencanakan akan dilakukan juga paralel session, dimana satu hari diselenggarakan di hotel dan satu hari diselenggarakan di Lemhannas.

Reni menambahkan bahwa pelaksanaan satu hari di Lemhannas merupakan paralel session yang akan di hadiri oleh para peneliti dan para pakar. “Jadi tulisan mereka kirim ke kita, kemudian itu yang akan kita seleksi untuk Jurnal. Jadi, kalau Pak Gubernur mengizinkan, pada tahun depan kita inisiasi Jurnal Internasional. Kalau tahun sekarang kita ingin Jurnal

Nasional dapat terakreditasi,” jelas Reni.

Di struktural organisasi yang ia pimpinnya, Reni mendorong pegawainya untuk bekerja dengan “happy”. Ia juga mengharapkan adanya penyehatan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengkajian Strategik.

Reni menginginkan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapannya di Lemhannas. “Saya ingin memberikan warna yang agak sedikit berbeda. Tapi semuanya harus dapat dukungan. Bagaimana pun saya ingin ada perbedaan di lingkungan Deputy Bidang Pengkajian Strategik, meski ada internal barrier bagi saya sebagai seorang deputy,” tuturnya.

Reni juga meyakini bahwa Allah SWT “membawa” nya ke Lemhannas RI bukannya tanpa tujuan. Allah SWT pasti akan memberikan jalan bagi saya. Mungkin dengan cara, kekuatan dan naluri saya untuk mengemban sebagai Deputy Pengkajian Strategik. Saya selalu meyakini apapun yang saya jalani, pasti yang terbaik menurut Allah SWT sehingga saya tidak pernah mengeluh apapun yang terjadi dan saya harus terus jalani,” pungkasnya.





Yopie Hambali, S.Sos., M.Sc.

## Menghargai Kearifan Lokal dan Tradisi di Daerah Kelahirannya

“Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”

Itulah prinsip hidup seorang Yopie, pria berkelahiran Bukittinggi, 35 tahun silam ini. Sempat menghabiskan masa kecilnya di Bukittinggi hingga kelas 3 Sekolah Dasar, Yopie tinggal di Jakarta ikut orangtuanya yang merantau pada tahun 1994.

Foto.  
Istimewa

**Y**opie yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dimasa kecilnya memiliki cita-cita untuk menjadi Menteri. “*Cita-cita di masa kecil dulu sempat ingin menjadi Menteri, saking hafalnya nama-nama Menteri Kabinet Pembangunan di era Presiden Soeharto dulu,*” kenangnya.

Di Jakarta, Yopie menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 75, SMA Negeri 78 Jakarta. Setelah tamat SMA, Yopie mengambil Program Studi S1 Ilmu Politik di Universitas Indonesia.



Lulus tahun 2008, Yopie berniat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski sempat gagal mengikuti seleksi Calon PNS (CPNS) di Kementerian Sekretariat Negara, akhirnya lulus seleksi CPNS di Lemhannas RI.

“Setelah lulus di tahun 2008, saya mencoba peruntungan pertama mengikuti seleksi CPNS di Kementerian Sekretariat Negara, namun belum berhasil. Barulah pada usaha yang kedua, saya lulus seleksi CPNS di Lemhannas RI,” jelasnya.

Menurut Yopie, lulusan dari Sarjana Ilmu Politik kebanyakan memang bekerja di institusi pemerintahan (PNS, Diplomat, dll), kemudian juga menjadi akademisi, peneliti, jurnalis, ataupun konsultan politik dan lembaga survei.

Ketika bergabung menjadi PNS Lemhannas RI, ia merasa bangga karena menurutnya, angkatan 2009 adalah generasi pertama yang direkrut melalui jalur umum, karena sebelumnya PNS yang berada di Lemhannas RI berasal dari berbagai PNS dari lingkungan Kementerian Pertahanan maupun lingkungan Mabes TNI dan Polri.

Yopie mengaku, ketika bekerja sebagai PNS Lemhannas RI, banyak beradaptasi dan menggali pengalaman tanpa meninggalkan budaya akademis dan nalar kritisnya. “Sejak pertama kali masuk Lemhannas, tentu ada nuansa dan kultur yang berbeda karena pegawainya meliputi tiga matra angkatan dan juga Polri. Perlu banyak adaptasi dan pengalaman, sampai akhirnya bisa tune-in dengan budaya kerja disini, tanpa meninggal budaya akademis dan nalar kritis yang

sudah tertanam sejak berkuliah di UI dulu”, ungkapnya.

Di awal karirnya sebagai PNS di Lemhannas RI, Yopie ditempatkan di Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Ia menjadi staf pelaksana di beberapa direktorat, diantaranya di Direktorat Konstitusi dan Sistem Nasional, dan Direktorat Program dan Pengembangan Pemantapan (sekarang Direktorat Perencanaan dan Pengembangan).

Pada tahun 2017, dengan kinerja yang baik akhirnya Yopie mendapatkan promosi jabatan eselon IV. Ia dipercaya untuk menjabat Kepala Seksi Evaluasi.

Sepanjang masa karirnya menjadi seorang PNS, ada beberapa pengalaman yang menurutnya berkesan dan masih ia kenang sampai saat ini. Beberapa pengalaman tersebut adalah menjadi peserta terbaik II pada program Diklat Prajabatan untuk CPNS Tahun 2009 di Badiklat Kementerian Pertahanan, menjadi visiting fellow (peneliti tamu) di Institute of South East Asian Studies (ISEAS) Singapura tahun 2013 dan terakhir menjadi peserta terbaik II pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) tahun 2018.

Pengalaman dan prestasi yang dimiliki Yopie saat ini, tidak lepas dari prinsip dan moto hidupnya. Menurutnya, sebagai orang yang sangat menghargai kearifan lokal dan tradisi di daerah kelahirannya, ia selalu menerapkan prinsip hidupnya di mana pun berada.

“Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung, selalu saya

terapkan di mana pun berada, sehingga kita bisa lebih cepat beradaptasi dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Dalam keluarga, saat ini Yopie telah memiliki dua orang putri yakni Aqeela Catalina Artadyo (6 tahun) dan Lavina Saskara Arkadyo (1,5 tahun), buah pernikahannya dengan *Cindy Vera Gita Kencana* yang bekerja disalah satu perusahaan konsultan advertising.

Sejak pertama kali di Lemhannas RI hingga saat ini, Yopie melihat Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terus bertransformasi dan berinovasi dengan cepat untuk merangkul berbagai komponen bangsa dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.

Berbagai program pun telah dilakukan antara lain adalah Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan APBN maupun Non-APBN, Pelatihan Untuk Pelatih, Dialog Wawasan Kebangsaan, termasuk program Evaluasi Dampak sebagai upaya untuk mengukur *outcome* yang telah dihasilkan oleh para Alumni di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang.

“Harapan saya, program-program yang kami lakukan dapat terus menginspirasi banyak orang, semakin inovatif dan meluas, serta mampu membumikan kembali marwah nilai kebangsaan di tengah dinamika ancaman saat ini, melalui kehadiran agen-agen perubahan yang telah menjadi Alumni Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan,” harapnya.



## Lanjutan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Negara Sanggup Penuhi Tambahan Anggaran?

**T**ahapan Pilkada 2020 mulai dilaksanakan lagi pekan depan, yaitu pada 15 Juni 2020 setelah sempat dinyatakan ditunda akibat pandemi

Covid-19. Pada Kamis (11/6), Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo. Selain itu, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DKPP Muhammad, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Rapat membahas anggaran Pilkada 2020. KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan tambahan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada 23 September akan dilaksanakan pada 9 Desember.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. "KPU menyampaikan surat permohonan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni sebesar Rp 4.768.653.986.000," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan kebutuhan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 1,02 triliun demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Juni.

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas

Covid-19. "Untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut, Menkeu sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,02 triliun pada Juni 2020," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat.

"Sedangkan realisasi anggaran di tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2020," tutupnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 jika tak mampu memenuhi tambahan anggaran untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Wahyu khawatir Pilkada 2020 malah bakal jadi sumber penularan massal Covid-19 jika protokol kesehatan tak dapat diterapkan secara maksimal. "Berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200 ribu penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol Covid-19 atau mengambil ajang uji coba," kata Wahyu dalam rapat.

Ia menyarankan pilkada ditunda hingga 6 bulan lagi dari yang dijadwalkan dalam perppu, yaitu pada 9 Desember 2020. Wahyu meminta Mendagri Tito Karnavian benar-benar kembali mempertimbangkan pelaksanaan pilkada di akhir tahun mendatang.

Sumber: nasional.kompas.com



## Kasus George Floyd: Jaksa tetapkan uang jaminan Rp17 miliar bagi mantan polisi tersangka pembunuh George Floyd

**M**antan polisi di Minneapolis yang dituduh membunuh pria kulit hitam tak bersenjata bernama George Floyd, 46 tahun, hadir di pengadilan untuk pertama kalinya. Jaksa menetapkan uang jaminannya sebesar US\$1,25 juta (Rp17,5 miliar). Jaksa menyebut “beratnya dakwaan” dan kemarahan publik sebagai alasan untuk menaikkan jaminannya dari US\$1 juta.

Kematian Floyd pada bulan Mei memicu aksi protes global dan desakan untuk reformasi kepolisian. Kematian berawal ketika dihentikan oleh polisi yang menyelidiki kasus pembelian rokok yang diduga menggunakan uang palsu pada 25 Mei di Minneapolis. Sebuah rekaman video menunjukkan Floyd ditangkap dan seorang polisi berkulit putih terus-menerus menidih lehernya dengan lutut selama beberapa menit, bahkan ketika dia memohon bahwa dia tidak bisa bernapas.

Demonstrasi kemudian pecah dan berlanjut setelahnya, baik di kota-

kota di Amerika Serikat dan kota-kota di seluruh dunia. Pada Rabu (03/06) demonstrasi mulai menyebar di Australia, Prancis, Belanda dan Inggris.

Bagi banyak orang, kemarahan atas kematian Floyd juga mencerminkan frustrasi menahun akan kondisi ketidaksetaraan ekonomi-sosial dan diskriminasi yang dialami orang kulit hitam di Amerika Serikat.

Chauvin, yang telah bertugas sebagai polisi selama 19 tahun, tidak mengajukan pembelaan ketika hadir melalui telekonferensi pada hari Senin. Ia tidak berbicara selama persidangan yang berlangsung selama 15 menit. Ia duduk di bangku kecil, mengenakan seragam oranye dan tangannya diborgol.

Hakim Jeannice M. Reding menetapkan uang jaminan sebesar US\$1,25 juta tanpa prasyarat, atau US\$1 juta dengan sejumlah persyaratan termasuk Chauvin tidak menghubungi keluarga Floyd, menyerahkan senjata api miliknya, dan tidak bekerja dalam penegakan hukum atau keamanan selama menunggu persidangan. Pengacara Chauvin tidak keberatan dengan besarnya uang jaminan.

Chauvin, saat ini ditahan di penjara negara bagian Minnesota di Oak Park Heights, setelah dipindahkan beberapa kali. Ia dijadwalkan hadir di persidangan berikutnya pada 29 Juni.

Chauvin menghadapi tiga dakwaan terpisah: pembunuhan tingkat dua yang tidak disengaja, pembunuhan tingkat tiga, dan pembunuhan tidak terencana tingkat dua, yang hukuman maksimumnya adalah hukuman penjara masing-masing 40, 25, dan 10 tahun.

Dakwaan lebih lanjut dapat diajukan namun sepertinya ia tidak mungkin didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama karena jaksa penuntut harus membuktikan perencanaan, maksud, dan motif, lansir *Associated Press*. Dengan mengajukan banyak dakwaan, jaksa memberikan juri pilihan dan meningkatkan kemungkinan hukuman.

Dewan kota Minneapolis telah melarang petugas polisi mencekik dan mengekang leher tersangka, dan partai Demokrat di Kongres telah menyusun undang-undang tentang reformasi polisi.

Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)



# Ilmuwan Inggris Kembangkan Inhaler untuk Cegah Gejala Corona

Foto. health.detik.com

**P**ara ilmuwan Inggris mengembangkan inhaler untuk membantu memerangi virus Corona COVID-19 setelah gejala awal muncul. Para peneliti dari University of Southampton sudah mengirim 120 inhaler ke pasien COVID-19, untuk di uji coba. Teknologi baru ini menjanjikan dengan menggunakan obat eksperimental, yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang memiliki kode SNG001.

Kekebalan tubuh ini mengandung protein bernama interferon beta, yang diproduksi tubuh setiap kali terinfeksi virus. Sebelumnya, obat ini telah digunakan untuk mengobati multiple sclerosis, dan menunjukkan hasil positif untuk mengurangi gejala COVID-19, saat diuji coba di Hong Kong dikombinasikan dengan obat lain.

“Kami sangat membutuhkan pengobatan yang akan diberikan untuk pasien COVID-19 di awal infeksi, untuk mencegah gejala yang ada berkembang lebih parah,” kata pemimpin studi, Profesor Nick Francis, yang dikutip dari The Sun, akhir Mei lalu.

Saat obat ini dihirup, itu akan mengirim zat ke paru-paru dan membantu untuk menekan efek virus. Dengan hasil tersebut, para ilmuwan berharap obat ini bisa mencegah kondisi pasien semakin memburuk, yang biasanya terjadi di hari ke-10 setelah terinfeksi.

“Kita bisa menghentikan kondisi pasien COVID-19 semakin memburuk, yang biasanya terjadi di minggu kedua. Di minggu tersebut, akan muncul gejala mirip flu pada pasien COVID-19, seperti terengah-engah dan mengalami radang paru-paru,” jelas

Richard Marsden, kepala perusahaan Synairgen, di Southampton.

Dalam tahap uji coba, pasien berusia 65 tahun ke atas akan diuji penuh selama 72 jam setelah munculnya masalah pernapasan dan gejala lainnya. Setelah itu, mereka akan diberikan inhaler satu kali sehari dan terus mencatat perubahan saturasi dan suhu oksigen. Selama uji coba ini, para dokter akan memantau kondisinya sampai 14 hari ke depan.

Jika percobaan ini berhasil, obat ini akan dilisensikan oleh regulator obat setempat. Tetapi, para peneliti berharap hasilnya baik agar lebih cepat diproses.

“Jika hasilnya baik, kami akan menyediakan jutaan dosis (obat) di akhir tahun ini,” kata Marsden.

Sumber: health.detik.com

# Kenapa Banyak Virus Berasal dari Kelelawar Bisa Mematikan?



Foto. inet.detik.com

**J**akarta – Bukan suatu kebetulan jika sejumlah virus mematikan dalam beberapa tahun belakangan seperti SARS, MERS, Ebola, Marburg dan yang terbaru 2019-nCoV yang menyebabkan COVID-19 diperkirakan berasal dari kelelawar. Kenapa banyak virus mematikan berasal dari hewan ini?

Sebuah penelitian terbaru dari University of California (UC) Berkeley, Amerika Serikat (AS) menemukan bahwa respons kekebalan yang kuat dari kelelawar terhadap virus dapat mendorong virus untuk bereplikasi lebih cepat.

Beberapa kelelawar, termasuk yang diketahui sebagai sumber penyebaran infeksi virus pada manusia, telah terbukti menjadi ‘rumah’ bagi sistem kekebalan yang terus-menerus dipersiapkan untuk meningkatkan pertahanan terhadap virus.

Infeksi virus pada kelelawar ini menyebabkan respons cepat yang

menghalangi virus keluar dari sel. Meskipun dapat melindungi kelelawar agar tidak terinfeksi dengan viral load yang tinggi, sistem kekebalan ini mendorong virus bereproduksi lebih cepat di dalam inang sebelum sistem pertahanan disiapkan.

Seperti dikutip dari Phys.org, hal ini menjadikan kelelawar sebagai reservoir unik dari virus yang cepat bereproduksi dan sangat mudah menular. Sementara kelelawar dapat menolerirnya, saat virus tersebut pindah ke makhluk hidup yang tidak memiliki sistem kekebalan respons cepat, maka virus tersebut dengan cepat membanjiri inang baru mereka, yang menyebabkan tingkat kematian tinggi.

Para peneliti juga mencatat, gangguan terhadap habitat kelelawar tampaknya memberi tekanan pada hewan ini dan membuat mereka menumpahkan lebih banyak virus dalam air liur, urin, dan feses mereka yang dapat menginfeksi hewan lain.

Brook sendiri bekerja dengan

program pemantauan kelelawar yang didanai oleh DARPA (Badan Proyek Penelitian Pertahanan Lanjutan AS) yang saat ini sedang berlangsung di Madagaskar, Bangladesh, Ghana dan Australia. Proyek bernama Bat One Health ini mengeksplorasi hubungan antara hilangnya habitat kelelawar dan penyebaran virus kelelawar ke hewan lain dan manusia.

“Intinya adalah bahwa kelelawar berpotensi istimewa dalam hal menampung virus,” kata Mike Boots, ahli ekologi penyakit dan profesor biologi integratif UC Berkeley.

“Ini bukan terjadi secara acak bahwa banyak dari virus berasal dari kelelawar. Kelelawar bahkan tidak berhubungan dekat dengan kita, jadi kita tidak akan menyangka mereka menjadi tuan rumah bagi banyak virus manusia. Tetapi penelitian ini menunjukkan bagaimana sistem kekebalan kelelawar dapat mendorong virulensi yang mengatasi ini,” jelasnya.

Sumber: inet.detik.com

# Bersyukur menjadi peserta Pendidikan Lemhannas RI



**Kol Arm Ruly Chandrayadi**

*Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX*

Program pendidikan Lemhannas RI merupakan program pendidikan yang ditujukan kepada TNI/POLRI, PNS dan unsur lain yang telah memenuhi persyaratan khusus, diantara proses seleksi yang ketat membuat tidak semua orang dapat berkesempatan menempuh pendidikan Lemhannas RI.

Salah satu peserta pendidikan yang saat ini menjabat sebagai ketua senat PPRA LX, Kol Arm Ruly Chandrayadi bersyukur dapat menjadi salah satu peserta pendidikan, “Kami bersyukur dapat menjadi peserta Lemhannas RI, banyak ilmu yang kami dapat diluar ilmu kemiliteran, selain itu kami dapat berinteraksi dengan peserta lain diluar TNI, manfaat bagi diri kami adalah memantapkan sebagai calon pimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional, serta dapat

**Lemhannas baginya adalah sebagai tempat pendidikan serta pementapan pemimpin – pemimpin bangsa untuk dapat bersikap arif dan bijaksana dalam berpola pikir, pola sikap dan pola tindakannya yang berpedoman pada nilai kebangsaan.**

mengasah pengetahuan khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat.” Ungkapnya.

Lemhannas baginya adalah sebagai tempat pendidikan serta pementapan pemimpin – pemimpin bangsa untuk dapat bersikap arif dan

bijaksana dalam berpola pikir, pola sikap dan pola tindakannya yang berpedoman pada nilai kebangsaan.

Pendidikan ini terasa berbeda karena harus dijalani dalam situasi pandemi Covid-19, namun tak sedikitpun menyurutkan semangat untuk terus menggali pengetahuan di Lemhannas RI, dan tidak lupa masyarakat juga harus selalu waspada dengan situasi yang belum dapat terkendali hingga kini.

“Virus Covid-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya, belum ditemukan vaksinnnya oleh karena itu kita sebagai masyarakat wajib melakukan pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah. Diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga wabah ini dapat segera teratasi.” pungkasnya.

# Berdamai Menjalani Pendidikan di Kala Pandemi

**Kombes Pol Djuhandhani Raharjo Puro S.H.**

*Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI*

Ditengah situasi pandemi Covid-19 ini, setiap orang di setiap lapisan masyarakat pasti mengalami dampaknya tersendiri, tak terkecuali seorang Kombes Pol Djuhandhani Raharjo Puro, yang sebelum menjalani pendidikan PPRA LXI, bertugas sebagai Kasubdit IV Politik dan Dokumen di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Saat ini Lemhannas RI menerapkan sistem pembelajaran secara daring untuk seluruh kegiatan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengurangi aktivitas langsung para peserta didik.

“Hal tersebut yang kami rasakan secara langsung sebagai Peserta didik Lemhannas saat ini, interaksi seluruh peserta dengan Lembaga tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan antara Lembaga dan peserta didik kurang terjalin.” jelasnya.

Baginya banyak sekali pelajaran yang didapatkan selama menjadi menjadi seorang peserta PPRA LXI. Meski pada masa pandemi Covid-19, tetapi menurutnya tidak sedikitpun mengurangi manfaat yang didapatkan, salah satu di antara manfaatnya yakni lebih terbuka secara wawasan pemikiran.

“Yang sebelumnya mungkin hanya berpandangan terbatas ruang lingkup tugas pokok saya, namun saat ini pola pemikiran saya secara pribadi lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan negara, dan saya merasakan bahwa dengan pemikiran seperti diatas tentu akan sangat bermanfaat bagi saya kelak dalam

melaksanakan tugas terutama dalam mengambil keputusan dan kebijakan.” ujarnya

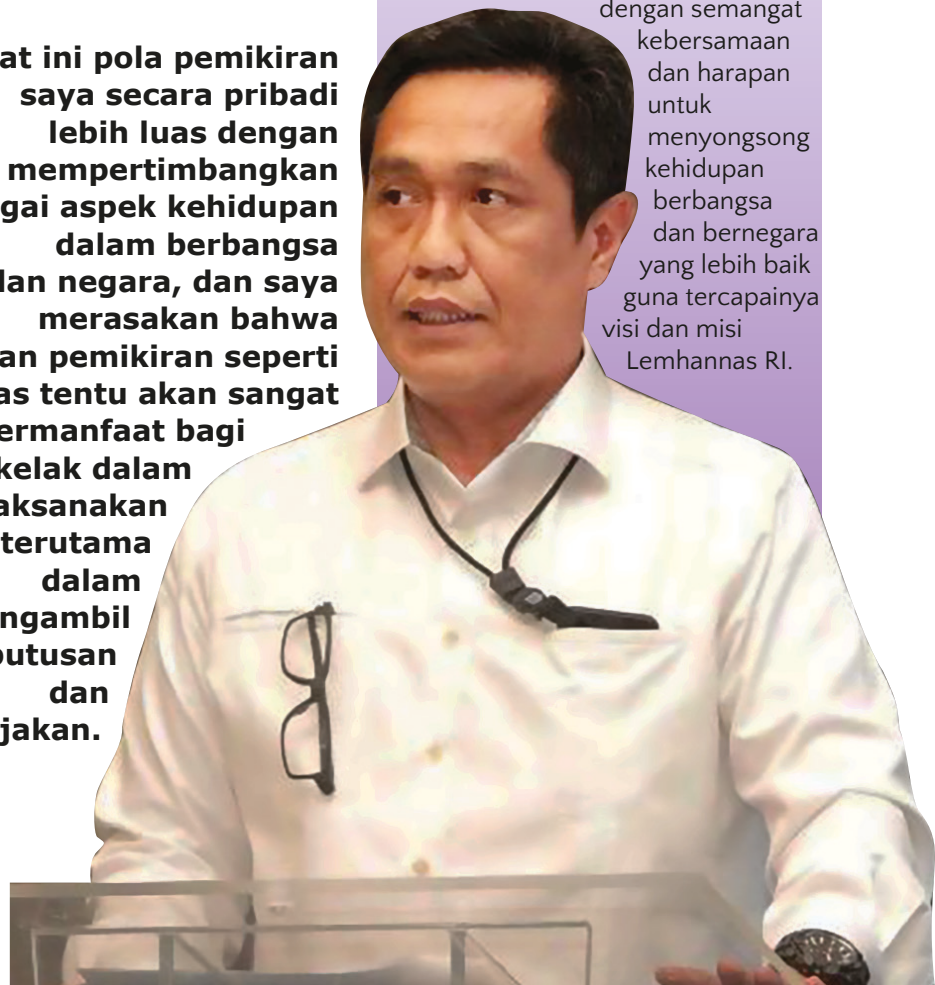
Djuhandhani berharap kepada pemerintah untuk lebih serius menanggulangi pandemi ini, dalam penanganannya menggunakan seluruh komponen yang ada sesuai tugas dan wewenangnya untuk dapat saling bahu membahu dan bekerjasama agar pandemi ini segera berakhir dan seluruh komponen masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala.

**Saat ini pola pemikiran saya secara pribadi lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan negara, dan saya merasakan bahwa dengan pemikiran seperti diatas tentu akan sangat bermanfaat bagi saya kelak dalam melaksanakan tugas terutama dalam mengambil keputusan dan kebijakan.**

“Negara dapat mendorong seluruh komponen pemerintahan untuk menyadarkan seluruh masyarakat agar dapat mempunyai kesadaran untuk menjalankan seluruh kebijakan yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah guna menghambat penyebaran COVID-19.” imbuhnya.

Selain itu, harapannya untuk Lemhannas yakni sebagai sebuah Lembaga yang mempersiapkan Pimpinan Nasional benar-benar dapat mewujudkan pembangunan

dengan semangat kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik guna tercapainya visi dan misi Lemhannas RI.



# Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa

Imam Subarkah, S.E., M.M., CFrA

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 Lemhannas RI



## PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya era globalisasi banyak memunculkan ancaman proxy, radikalisme dan terorisme seperti di Timur Tengah. Ancaman ini disinyalir dilakukan oleh aktor state maupun non state sebagai agenda politik global guna mencapai kepentingan tertentu dari negara sasaran, khususnya yang kaya akan sumber daya alam, sehingga perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Agenda politik global tersebut lebih mengarah pada pola proxy sehingga menimbulkan kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal dan konflik vertikal, sehingga jelas menjadi ancaman bagi integrasi bangsa.

Isu-isu radikalisme, terorisme dan perang saudara di Timur Tengah memperlihatkan rapuhnya kewaspadaan pemerintah serta masyarakat negara tersebut, sehingga menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia. Potensi ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, salah satunya dengan maraknya isu-isu berita *hoax* atau *fake news*.<sup>1</sup> Di samping itu, isu-isu agenda terorisme global, dukungan terhadap separatis, penyebaran ideologi radikal, intoleransi sampai kemunculan kerajaan-kerajaan baru menjadi potensi ancaman nyata yang perlu dihadapi bangsa Indonesia.

Fenomena ini sepatutnya menjadi perhatian serius bangsa Indonesia untuk lebih memperhatikan

pentingnya kewaspadaan nasional. Dari uraian di atas dapat diperoleh aspek-aspek penting yang perlu dianalisa meliputi peran pemerintah dan masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap kemajemukan dan jiwa nasionalisme bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dianalisis dalam karya tulis ini adalah “Bagaimana meningkatkan kewaspadaan nasional dalam mencegah disintegrasi bangsa?”.

## PEMBAHASAN

Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman.<sup>2</sup> Kewaspadaan Nasional juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan, serta kemampuan seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat terhadap berbagai bentuk potensi ancaman yang terus berkembang. Oleh sebab itu, ditengah berbagai kelemahan yang ada, maka peningkatan kewaspadaan nasional perlu dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa.

Peristiwa nyata yang terjadi di kehidupan nasional berikut ini menjadi

bukti bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan nasional. Peristiwa Tepuk Pramuka pada tahun 2020 “Islam Yes, Kafir No” yang dilakukan seorang pembina di SD Kota Yogyakarta<sup>3</sup>. Yang paling sedih lebih dari 23 persen pelajar, generasi penerus kita dan mahasiswa tidak peduli dengan Pancasila, bahkan mendukung agar negara Indonesia menjadi negara khilafah.<sup>4</sup> Setara Institute juga mencatat terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Yogyakarta selama lima tahun terakhir.<sup>5</sup> Demikian juga dengan data LSI dan Wahid Institute, intoleransi religius-kultural cenderung turun sejak 2010, namun penurunan ini berhenti di 2017. Pasca 2017 intoleransi religious-kultural cenderung meningkat terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.<sup>6</sup> Data Kementerian Pertahanan tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme, 18 persen pegawai swasta menolak ideologi Pancasila serta 19 persen pegawai BUMN dan pegawai negeri sipil menolak ideologi Pancasila.<sup>7</sup>

Di tengah berbagai potensi ancaman tersebut, maka perlu meningkatkan kewaspadaan nasional dengan melakukan



melalui berbagai upaya. **Pertama**, peningkatan peran pemerintah dan masyarakat. Dalam menghadapi berbagai potensi ancaman tersebut pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa sehingga berperan vital untuk dapat mendeteksi, mencegah dan mengantisipasinya sejak dini. Untuk meningkatkan peran tersebut, maka perlu adanya upaya untuk memperkuat dan mensinergikan seluruh kekuatan institusi terkait untuk mengantisipasi potensi ancaman demi mencegah terjadinya disintegrasi bangs. Sebagaimana pemahaman penjelasan dalam teori Sinergi menurut James A. F. Stoner sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang pada intinya dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar.<sup>8</sup> Oleh karenanya, elemen pemerintah dan masyarakat lebih bersinergi untuk saling berbagi informasi dan menganalisis potensi ancaman agar dapat melaksanakan strategi pencegahan secara tepat.

Peran Kementerian agama dalam melaksanakan program moderasi beragama perlu ditingkatkan dan didukung oleh elemen masyarakat. Peran pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan nasional menggunakan konsep Penta Helix yaitu melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa dan komunitas. Melalui kolaborasi ini diharapkan potensi ancaman dapat direduksi bahkan dihilangkan sehingga keutuhan NKRI terjaga. Pemerintah perlu memfasilitasi peran tokoh agama dan masyarakat dalam upaya mereduksi dan mencegah potensi ancaman.

Adanya potensi ancaman radikalisme di kalangan penyelenggara negara, pemerintah telah mengambil langkah dengan adanya SKB dari 10 kementerian dan lembaga (Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemenkum HAM, KemenPAN-RB, Kemendikbud, BIN, BNPT, BPIP, BKN, dan KASN). Namun hal tersebut dirasa belum cukup, maka diperlukan evaluasi

terhadap tahapan dalam pola rekrutmen dan memperketat proses seleksi. Model dengan asesmen dalam rekrutmen dilaksanakan dalam menilai calon secara komprehensif termasuk integritasnya terhadap empat konsensus dasar sehingga diperoleh penyelenggara negara berkomitmen kepada bangsa dan negara.

Selain itu, pemerintah harus menelusuri rekam jejak para calon. Melalui informasi dari lingkungan masyarakat tempat tinggal, pendidikan dan pergaulan sehari-hari. Selain itu, menelusuri rekam jejak digital akan dapat diperoleh diskripsi bagaimana karakter dari seorang calon tersebut. Penelusuran rekam jejak digital tidak hanya dilakukan kepada calon tetapi juga seluruh penyelelenggara negara. Hal ini berguna sebagai acuan dalam proses pembinaan karakter seorang penyelenggara negara.

**Kedua**, menjaga dan merawat keberagaman dalam kesatuan. Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai



Foto. www.gurupendidikan.co.id

kebersatuan dari latar belakang yang berbeda untuk meraih suatu tujuan, tegasnya kebersatuan atas dasar keragaman. Bersatu bisa bermakna kesadaran atas keragaman. Karena beragam, maka supaya kuat dan berhasil menggapai sesuatu diperlukan upaya bersatu. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Namun, kemajemukan bangsa kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang dapat mengancam kebinekaan kita. Keberagaman ini ditolak kenyataannya oleh sekelompok ekstremis yang terus mengupayakan penyeragaman. Maraknya aksi intoleransi, ucapan kebencian hingga konflik atas nama agama yang terjadi belakangan pada hakekatnya merupakan upaya penolakan atas Sumpah Pemuda dan Bhinneka tunggal Ika. Tantangan itu begitu terasa ketika bangsa Indonesia memerlukan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi potensi ancaman disintegrasi bangsa.

Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam masyarakat Indonesia adalah merupakan keniscayaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan nilai-nilai kebhinnekaan itu merupakan sarat mutlak untuk menjamin keutuhan bangsa ini. Pemerintah berperan aktif dalam mensosialisasikan makna dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika baik dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Sesuai teori pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang mana masyarakat menjadi cukup kuat guna berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, serta mempengaruhi terhadap kejadian-

kejadian<sup>9</sup>. Selaras dengan itu, maka pelibatan peran serta kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sangat dibutuhkan dalam mengaktualisasikan pemahaman kemajemukan. Demikian juga dengan peran media massa dan media sosial diperlukan untuk memperkuat pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat akan arti penting merawat keberagaman.

**Ketiga**, Penguatan nasionalisme bangsa. Berdasarkan teori nasionalisme, paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama adalah nasionalisme.<sup>10</sup> Nasionalisme berhubungan erat dengan kewaspadaan mengingat dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka masyarakat akan memiliki kewaspadaan yang kuat. Dengan demikian pembinaan nasionalisme dapat dimanifestasikan ke dalam program kewaspadaan nasional untuk membentuk kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

Nasionalisme mengandung unsur-unsur wawasan, paham dan semangat kebangsaan yang satu dan lainnya saling berpengaruh dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, pembinaan nasionalisme harus terus ditumbuhkan pada masyarakat bangsa dan dikembangkan secara berstruktur mulai dari pemahaman, penghayatan, sampai muncul tingkat kesadarannya, kemudian menjadikannya suatu paham dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham kebangsaan inilah yang dapat menumbuhkan rasa kebangsaan berupa rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan berupa kesadaran dan semangat bela negara.

Pembinaan nasionalisme ini dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran tersebut tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibina sejak dini dengan melibatkan semua komponen bangsa. Pendidikan nasionalisme ditanamkan sejak dini mulai dari keluarga sebagai sentral, sekolah, komunitas, masyarakat, lingkungan kerja dan ruang-ruang kelembagaan memberikan wawasan kebangsaan dengan bahasa sederhana menggunakan metode kekinian sehingga mampu membangkitkan jiwa nasionalisme.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kewaspadaan nasional pada hakikatnya merupakan suatu manifestasi penting dalam menjaga integritas nasional dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah dinamika politik global. Namun demikian, dalam perkembangannya banyak potensi ancaman sehingga memerlukan kesiapan dan kesiagaan bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Untuk itu bangsa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional di era globalisasi demi menjaga integrasi bangsa.

Untuk mengatasinya lemahnya kewaspadaan nasional dalam mencegah disintegrasi bangsa diperlukan peningkatan peran dari pemerintah dan masyarakat dengan konsp pentahelix, merawat kemajemukan dan penguatan nasionalisme bangsa untuk menciptakan kesadaran pentingnya kewaspadaan nasional dalam mengantisipasi potensi ancaman.

### **Rekomendasi.**

Untuk mencegah potensi

ancaman menjadi ancaman nyata yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, maka pemerintah beserta segenap elemen bangsa perlu meningkatkan jiwa nasionalisme bangsa secara intens ke seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

#### Endnotes:

- 1 Juliswara, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*, (Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017), hlm. 149.
- 2 Tim Pokja, *Naskah Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*, Jakarta : Lemhannas RI, 2020.
- 3 <https://nasional.tempo.co/read/1295463/kwartir-nasional-sesalkan-yel-yelpramuka-islam-yes-ka-fir-no/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.05 wib.
- 4 <https://www.tagar.id/menyedihkan-3-persen-prajurit-tni-terpapar-radikalisme-19-persen-pns-tolak-pancasila> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.06 wib.
- 5 <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/24/19300051/setara--dalam-5-tahun-terakhir-terjadi-peningkatan-intoleransi-di-yogyakarta> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.10 wib.
- 6 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.11 wib.
- 7 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/08/07/pvusqy366-bin-prajurit-tni-terpapar-radikalisme-harus-disterilisasi> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.15 wib.

- 8 James A.F. Stoner, *Manajemen Jilid I dan II Edisi II*.
- 9 Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 59.
- 10 Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 -1918*, (Terj. LIPI, Michigan: Grafitipers, 1989), hlm. 2.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akira Nagazumi. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 -1918*. Terj. LIPI, Michigan: Grafitipers.
- Edi Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hikam, Muh A S. 2016. *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme*. Jakarta : Kompas Penerbit Buku.
- Idup, Suhady dan Sinaga, AM. 2003. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN
- James A.F. Stoner, *Manajemen Jilid I dan II Edisi II*.
- Juliswara. 2017. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017
- Muslich. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yogyakarta, Gava Media
- Tim Pokja. 2020. *Materi Pokok*

Kewaspadaan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.

Ani Nursalikah, BIN prajurit TNI terpapar radikalisme harus disterilisasi <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/08/07/pvusqy366-bin-prajurit-tni-terpapar-radikalisme-harus-disterilisasi> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.15 wib.

CNN Indonesia, Intoleransi di era Jokowi masih tinggi dalam [https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi)

[1103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi) diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.11 wib.

Endri Kurniawati, Kwartir Nasional sesalkan yel-yel pramuka dalam <https://nasional.tempo.co/read/1295463/kwartir-nasional-sesalkan-yel-yelpramuka-islam-yes-kafir-no/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.05 wib.

Fetra Tumanggor, Menyedihkan 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme dalam <https://www.tagar.id/menyedihkan-3-persen-prajurit-tni-terpapar-radikalisme-19-persen-pns-tolak-pancasila> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.06 wib.

Kompas Nasional, Setara dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan intoleransi di Yogyakarta dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/24/19300051/setara--dalam-5-tahun-terakhir-terjadi-peningkatan-intoleransi-di-yogyakarta> diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 12.10 wib.

## Lemhannas RI Adakan *Rapid Test* COVID-19 bagi Seluruh Anggota

Lemhannas RI mengadakan *Rapid Test* COVID-19 bagi seluruh anggota Lemhannas RI pada Senin (13/4) berdasarkan pembagian jadwal tiap unit kerja yang telah ditentukan di surat edaran.



## Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. pada Kamis, (31/3) di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.



## Gubernur Lemhannas RI Lantik dan Lepas Sejumlah Pejabat Eselon

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik dan mengangkat 22 pejabat eselon I, II, III, dan IV serta melepas 20 pejabat eselon I, II, dan III. Upacara yang dilaksanakan pada Kamis, (16/4) ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *conference call* demi menjaga *physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).





### Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Diskusi Online terkait Ketahanan Nasional di Tengah Pandemi COVID-19

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam Diskusi Online yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pada Senin, (27/4).

### 15.500 Bantuan Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis dalam Menghadapi COVID-19

Lemhannas RI menyalurkan bantuan sejumlah 15.500 alat kesehatan kepada sejumlah pihak yang membutuhkan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kepada beberapa perwakilan tenaga medis untuk distribusikan langsung ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas, pada Rabu (29/4), di Ruang Nusantara.



### Perista Lemhannas RI Berikan Bantuan Buku Tulis Sebagai Upaya Mendukung Pendidikan Bangsa

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Lemhannas RI, Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengadakan Bakti Sosial Penyerahan Bantuan Buku Tulis Kepada Putra Putri Anggota Lemhannas RI. Penyerahan bantuan sebanyak 2680 buku tulis tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa perwakilan anggota Lemhannas RI pada Selasa (12/5), di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.





### Komisaris Jenderal Polisi Drs. Didid Widjanardi, S.H. dilantik menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI pada Kamis (14/5) di Ruang Nusantara, Lemhannas RI.

### Peringatan Hari Lahir Pancasila

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 secara dalam jaringan (daring), Senin (1/6).



### Gubernur Lemhannas RI di Sespimti POLRI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah dengan topik "Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi Yang Profesional, Berintegritas, dan Unggul guna Menjamin Keamanan Nasional dan Ketertiban dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional" kepada peserta Sespimti Polisi RI, pada Rabu (10/6) secara dalam jaringan (daring).



# HARI ULANG TAHUN KE-



## LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

20 MEI 1965 - 20 MEI 2020

DENGAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL, KITA BANGUN SDM UNGGUL INDONESIA MAJU

Selamat Hari Raya  
Idulfitri

1 Syawal 1441 H

